



KATA PENGANTAR





DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| KEPUTUSAN DITJEN CIPTA KARYA | |
| SURAT EDARAN | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran..... | 2 |
| 1.2.1. Maksud..... | 2 |
| 1.2.2. Tujuan | 3 |
| 1.2.3. Sasaran..... | 3 |
| 1.3. Lingkup Kajian | 3 |
| 1.4. Pengertian | 4 |
| 1.4.1. Definisi | 4 |
| 1.4.2. Singkatan-Singkatan..... | 5 |
| 1.5. Dasar Kebijakan | 6 |
| 1.6. Pendekatan, Kebijakan dan Strategi | 6 |
| 1.6.1. Pendekatan..... | 6 |
| 1.6.2. Kebijakan | 7 |
| 1.6.3. Strategi..... | 7 |
| | |
| BAB II IDENTIFIKASI LOKASI..... | 9 |
| 2.1. Gambaran Umum Kegiatan Identifikasi..... | 9 |
| 2.2. Penetapan Lokasi Kajian (Sebagai Input) | 10 |
| 2.2.1. Inventarisir Daftar Desa yang akan Didata | 10 |
| 2.2.2. Inventarisir Pulau-Pulau Kecil yang akan Didata..... | 11 |
| 2.3. Tata Cara Peliputan Data dan Informasi | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3.1. Peliputan Sekunder..... | 11 |
| 2.3.2. Peliputan Primer..... | 12 |
| 2.3.3. Hasil Peliputan Data dan Informasi..... | 13 |
| BAB III IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERPENCIL..... | 15 |
| 3.1. Definisi Desa Terpencil..... | 15 |
| 3.2. Kriteria Desa Terpencil..... | 15 |
| 3.3. Parameter Desa Terpencil Berdasarkan Kriteria..... | 15 |
| 3.4. Instrumen Penilaian (Scoring Tools) Desa Terpencil..... | 16 |
| 3.5. Rumusan Kelompok Tipologi Desa Terpencil..... | 17 |
| BAB IV IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERTINGGAL..... | 19 |
| 4.1. Definisi Desa Tertinggal..... | 19 |
| 4.2. Kriteria Desa Tertinggal..... | 19 |
| 4.3. Parameter Desa Tertinggal Berdasarkan Kriteria..... | 19 |
| 4.4. Instrumen Penilaian (Scoring Tools) Desa Tertinggal..... | 20 |
| 4.5. Rumusan Kelompok Tipologi Desa Tertinggal..... | 23 |
| BAB V IDENTIFIKASI LOKASI PULAU-PULAU KECIL..... | 25 |
| 5.1. Definisi Pulau-Pulau Kecil..... | 25 |
| 5.2. Kriteria Pulau-Pulau Kecil..... | 25 |
| 5.3. Parameter Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Kriteria..... | 25 |
| 5.4. Instrumen Penilaian (Scoring Tools) Pulau-Pulau Kecil..... | 26 |
| 5.5. Rumusan Kelompok Tipologi Pulau-Pulau Kecil..... | 29 |
| BAB VI IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN POTENSI KAWASAN..... | 31 |
| 6.1. Identifikasi Permasalahan..... | 31 |
| 6.1.1. Permasalahan Desa Terpencil..... | 31 |
| 6.1.2. Permasalahan Desa Tertinggal..... | 31 |
| 6.1.3. Permasalahan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil..... | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 6.2. Identifikasi Potensi..... | 32 |
| 6.2.1. Potensi Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil | 32 |
| 6.2.2. Potensi Kawasan Non Pesisir..... | 33 |
| 6.3. Pentingnya Identifikasi Karakteristik Daerah (Permasalahan dan Potensi)..... | 36 |
| BAB VII SKENARIO PENANGANAN..... | 37 |
| 7.1. Penanganan dengan Pendekatan Kawasan (Regional Approach) | 37 |
| 7.2. Penanganan dengan Pendekatan Daerah (Territorial Approach) | 37 |
| 7.3. Indikasi Bentuk Penanganan | 38 |
| 7.3.1. Indikasi Bentuk Penanganan Penyelesaian Permasalahan | 38 |
| 7.3.2. Indikasi Bentuk Penanganan Pengembangan Potensi Kawasan..... | 42 |
| 7.4. Identifikasi Pengelolaan Penanganan | 45 |
| 7.4.1. Penanganan Pembangunan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota..... | 46 |
| 7.4.2. Sumber Pendanaan | 47 |
| 7.4.3. Langkah Penanganan Pembangunan | 48 |
| 7.5. Strategi Prioritas Penanganan..... | 50 |
| 7.5.1. Rumusan Prioritas Penanganan Permasalahan..... | 50 |
| 7.5.2. Rumusan Prioritas Penanganan Pengembangan Potensi Daerah | 50 |
| 7.5.3. Skema Strategi Prioritas Penanganan..... | 51 |
| 7.5.4. Keberlangsungan Program (Sustainability) | 52 |
| BAB VIII PENYAJIAN HASIL IDENTIFIKASI | 53 |
| 8.1. Penyajian Hasil Kajian | 53 |
| 8.1. Matriks Penanganan Daerah Terpencil | 53 |
| 8.2. Matriks Penanganan Kawasan Tertinggal | 53 |
| 8.3. Matriks Penanganan Pulau-Pulau Kecil | 53 |
| 8.4. Matriks Pengembangan Potensi Daerah | 53 |
| 8.2. Legalisasi Hasil Identifikasi..... | 54 |

LAMPIRAN

1. TABEL PENILAIAN (*SCORING*)
 - a. Contoh Isian Tabel Penilaian Desa Terpencil
 - b. Contoh Isian Tabel Penilaian Desa Tertinggal
 - c. Contoh Isian Tabel Penilaian Pulau-Pulau Kecil
2. TABEL PENGELOMPOKAN TIPOLOGI
 - a. Contoh Isian Tabel Pengelompokan Desa Terpencil
 - b. Contoh Isian Tabel Pengelompokan Desa Tertinggal
 - c. Contoh Isian Tabel Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil
3. MATRIKS PENANGANAN
 - a. Contoh Isian Matriks Penanganan Desa Terpencil
 - b. Contoh Isian Matriks Penanganan Desa Tertinggal
 - c. Contoh Isian Matriks Penanganan Pulau-Pulau Kecil
 - d. Contoh Isian Matriks Penanganan Pengembangan Potensi daerah
4. FORMAT *QUESTIONNAIRE* TINGKAT KECAMATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004-2009 digambarkan bahwa kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar, seperti:

- antara Jawa – Luar Jawa,
- antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta
- antara kota – desa.

Untuk dua konteks pertama, ketimpangan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang pada titik yang paling ekstrim, muncul dalam bentuk upaya-upaya separatis. Sedangkan untuk konteks yang ketiga – kesenjangan antara desa dan kota – disebabkan oleh investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibatnya, kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan wilayah perdesaan relatif tertinggal.

Ketertinggalan tingkat kemajuan wilayah perdesaan juga disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas dan kualitas petani dan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap sumber daya permodalan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perdesaan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan, yang mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia, khususnya petani masih sangat rendah tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan perkotaan.

Percepatan desentralisasi dan otonomi daerah menghadapi kendala antara lain: masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional; masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal); belum tersusunnya kelembagaan yang efektif; belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah antara lain

karena belum jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berakibat pada tumpang tindihnya kebijakan pusat daerah, masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah, masih rendahnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, serta meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru yang belum sesuai dengan tujuannya.

Penyeimbangan pembangunan sudah saatnya mulai dilaksanakan diantaranya memulai pembangunan desa terpencil, tertinggal dan pulau pulau kecil sesuai kebutuhan kondisi fisik setempat dan kebutuhan komunitas dalam menunjang kehidupan dan penghidupan sehari harinya

Desa tertinggal, terpencil dan pulau pulau kecil secara rata rata dapat dikategorikan sebagai wilayah yang pelayanan infrastrukturnya jauh dari standar minimal.

Penanganan desa terpencil, tertinggal dan pulau pulau kecil hendaknya dilakukan bukan sekedar pemerataan pembangunan tapi justru menjadi fokus kegiatan pembangunan nasional yang dampak utamanya adalah menghilangkan ketertinggalan dan meminimalkan kemiskinan masyarakat melalui layanan kemudahan bagi kawasan tersebut serta komunitas yang tinggal didalamnya.

Pengembangan Kawasan dan Permukiman merupakan entry point yang konsep penanganannya telah mendekati baku dengan pendekatan pemberdayaan (sosial kemasyarakatan, ekonomi dan lingkungan) akan menyentuh langsung secara komprehensif baik fisik kawasannya maupun masyarakat yang tinggal didalamnya.

Kegiatan identifikasi desa terpencil, tertinggal dan pulau pulau kecil diharapkan dapat mendata kawasan kawasan tersebut secara rinci yang ditampilkan dalam urutan prioritas yang mengutamakan kawasan yang perlu segera ditangani, melalui pendekatan dan batasan daerah pada hirarki Kabupaten.

Sementara itu Program pembangunan Nasional (Propenas) menjadikan pengembangan kawasan tertinggal sebagai prioritas pembangunan dan pada dasarnya kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemerataan pembangunan agar secara keseluruhan Pembangunan Nasional maju secara bersama.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Kegiatan Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil memiliki maksud mendapatkan daftar lokasi desa terpencil, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil yang diindikasikan pada suatu Kabupaten/Kota yang telah ditentukan sebelumnya.

1.2.2. Tujuan

Kegiatan Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk memudahkan pemrograman penanganan pada tahapan selanjutnya pada desa terpencil, desa tertinggal dan pulau-pulau yang diindikasikan dalam daftar lokasi.

1.2.3. Sasaran

Sasaran (goals) Kegiatan Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil yaitu:

- Tersusunnya daftar lokasi desa sesuai dengan urutan prioritas berawal dari lokasi-lokasi paling rawan yang perlu segera ditangani.
- Terstrukturnya penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil sesuai prioritas.

1.3. Lingkup Kajian

Lingkup substansi kajian yang akan dilakukan dalam Kegiatan Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil meliputi :

1. Persiapan
2. Inventarisir dan Review Kebijakan Nasional
3. Penetapan Definisi dan Parameter secara kualitatif dan kuantitatif
4. Identifikasi Deliniasi dan Inventarisasi desa-desa
5. Konfirmasi desa teridentifikasi
6. Analisa Kawasan Perencanaan
 - Penilaian (Scoring)
 - Pengelompokan Tipologi
 - Identifikasi Potensi & Permasalahan Desa
7. Penetapan Prioritas Penanganan
8. Penyusunan Skenario & Strategi Penanganan berdasarkan Tipologi
9. Menetapkan Lembaga/Instansi yang berwenang melakukan penanganan
10. Menyusun Daftar Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil

1.4. Pengertian

1.4.1. Definisi

Dalam Kegiatan Identifikasi Lokasi Kawasan Tertinggal, Daerah Terpencil dan Pulau-Pulau Kecil yang dimaksud dengan:

- **Identifikasi** adalah usaha mengenali dengan pertimbangan/kriteria tertentu.
- **Lokasi** adalah batasan wilayah dengan deliniasi tertentu.
- **Identifikasi Lokasi** adalah usaha menetapkan wilayah dengan deliniasi tertentu sesuai dengan pertimbangan/kriteria tertentu.

Sehingga yang dimaksud dengan **Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil** merupakan suatu studi/kajian sebagai upaya penetapan lokasi-lokasi yang termasuk dalam kriteria dan parameter Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan sesuai Kebijakan-Kebijakan Nasional.

Yang dimaksud dengan:

- **Kawasan** adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya (*Peraturan Pemerintah No 47/1997 tentang RTRWN*);
- **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional (*Peraturan Pemerintah No 47/1997 tentang RTRWN*);
- **Ruang** adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (*Peraturan Pemerintah No 47/1997 tentang RTRWN*);
- **Kawasan permukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/ lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (*Peraturan Pemerintah No 47/1997 tentang RTRWN*);
- **Kawasan perdesaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (*Peraturan Pemerintah No 47/1997 tentang RTRWN*);

- **Kawasan perkotaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (*Peraturan Pemerintah No 47/1997 tentang RTRWN*).

1.4.2. Singkatan-Singkatan

| | |
|--------------|---|
| APBD | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| Bappeda | : Badan Perencanaan Daerah |
| BPS | : Biro Pusat Statistik |
| DAK | : Dana Alokasi Khusus |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| KAT | : Komunitas Adat Terpencil |
| KBI | : Kawasan Barat Indonesia |
| KTI | : Kawasan Timur Indonesia |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| Monev | : Monitoring dan Evaluasi |
| PKL | : Pedagang Kaki Lima |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| Propenas | : Program Pembangunan Nasional |
| Puskesmas | : Pusat Kesehatan Masyarakat |
| RPJM | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah |
| RPJMK | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten |
| RT | : Rukun Tetangga |
| RTRWK | : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten |
| RTRWN | : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional |
| RW | : Rukun Warga |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SDA | : Sumber Daya Alam |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SMP | : Sekolah Menengah Pertama |
| Strada PDT-K | : Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten |
| UKM | : Usaha Kecil Menengah |

1.5. Dasar Kebijakan

Dasar Kebijakan Nasional yang dijadikan acuan kajian dalam Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil antara lain yaitu:

- Peraturan Presiden No: 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004-2009
- Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No: 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: 41 tahun 2000 tentang Pedoman umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan Dan Berbasis Masyarakat.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: Kep.67/Men/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 41 tahun 2000 tentang Pedoman umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan Dan Berbasis Masyarakat.
- RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota)
- RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota)
- Strada PDT-K (Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten/Kota)

1.6. Pendekatan, Kebijakan dan Strategi

1.6.1. Pendekatan

Pelaksanaan Kajian Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan dua arah pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perencanaan **Top-down** merupakan arah perencanaan yang bergerak dari atas bergerak ke bawah. Pendekatan dari atas harus dilakukan terutama pada kegiatan review dan acuan kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Pendekatan perencanaan **Bottom-Up** adalah konsep perencanaan dengan aspirasi yang muncul dari bawah. Pendekatan dari bawah harus dilakukan terutama pada kegiatan identifikasi karakteristik permasalahan dan potensi tiap lokasi. Dengan demikian, maka gambaran karakteristik yang diperoleh merupakan hasil yang valid, akurat, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Program penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil memiliki beberapa **azas pembangunan** yang merupakan acuan dasar pelaksanaan, antara lain:

1. Azas Manfaat
2. Azas Berkeadilan
3. Azas Berkelanjutan
4. Azas Pemberdayaan Masyarakat Lokal
5. Azas Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota

1.6.2. Kebijakan

Kebijakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil, antara lain:

1. **Pemilihan Lokasi** difokuskan pada desa-desa dan pulau-pulau kecil yang termasuk dalam kriteria terpencil dan tertinggal, dengan penekanan pada kawasan-kawasan permukiman dengan indikator unit administratif desa.
2. **Meningkatkan aksesibilitas, keterkaitan serta sarana dan prasarana** kawasan dalam rangka mengeliminir keterpencilan dan ketertinggalan kawasan pada permasalahan ketersediaan infrastruktur.
3. **Memberikan bantuan teknis sebagai stimulan** untuk pengembangan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil yang berwawasan potensi lokal (spesifik).
4. **Mengembangkan Manajemen Pembangunan** Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil secara terprogram, menyeluruh, berkelanjutan dan partisipatif serta bermuatan tridaya (pemberdayaan masyarakat, usaha dan lingkungan).
5. **Mengembangkan kapasitas institusi dan kesadaran** pemerintah daerah, komunitas lokal dan perangkat hukum yang baik dalam rangka tata pemerintah yang baik (*good governance and management*).
6. **Menggerakkan dan mendorong terjadinya investasi** pada Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil melalui kerjasama antara pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat.

1.6.3. Strategi

Program penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil memiliki beberapa strategi pelaksanaan yang diharapkan mampu mencapai tujuan seperti yang diharapkan sesuai dengan indikator pencapaiannya. Beberapa strategi pelaksanaan program penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil antara lain:

1. **Melakukan identifikasi karakteristik** secara aktual, faktual, detail dan menyeluruh sampai pada level terendah guna menggali permasalahan dan potensi kawasan.
2. **Melakukan review pada program penanganan dan pengelolaan** yang telah ada dan berjalan oleh pemerintah kabupaten/kota
3. **Melakukan identifikasi bentuk penanganan untuk mengatasi permasalahan** Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil secara spesifik sesuai dengan permasalahan yang ada
4. **Melakukan identifikasi bentuk penanganan untuk pengembangan potensi** Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil secara spesifik sesuai dengan potensi yang dimiliki
5. **Melakukan identifikasi instansi yang merupakan aktor pelaksana** penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil
6. **Menyusun agenda yang partisipatif** terhadap aspirasi dan permasalahan komunitas lokal
7. **Menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan yang lebih luas**, termasuk mendorong inisiatif swasta untuk melakukan investasi pada kawasan
8. **Mendorong dan memberdayakan institusi pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat** agar lebih mampu merencanakan dan mengelola kawasan
9. **Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif** untuk mengoptimalkan implementasi penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil
10. **Mendokumentasikan dan mendiseminasikan pengalaman-pengalaman** (*good and practices*) penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil

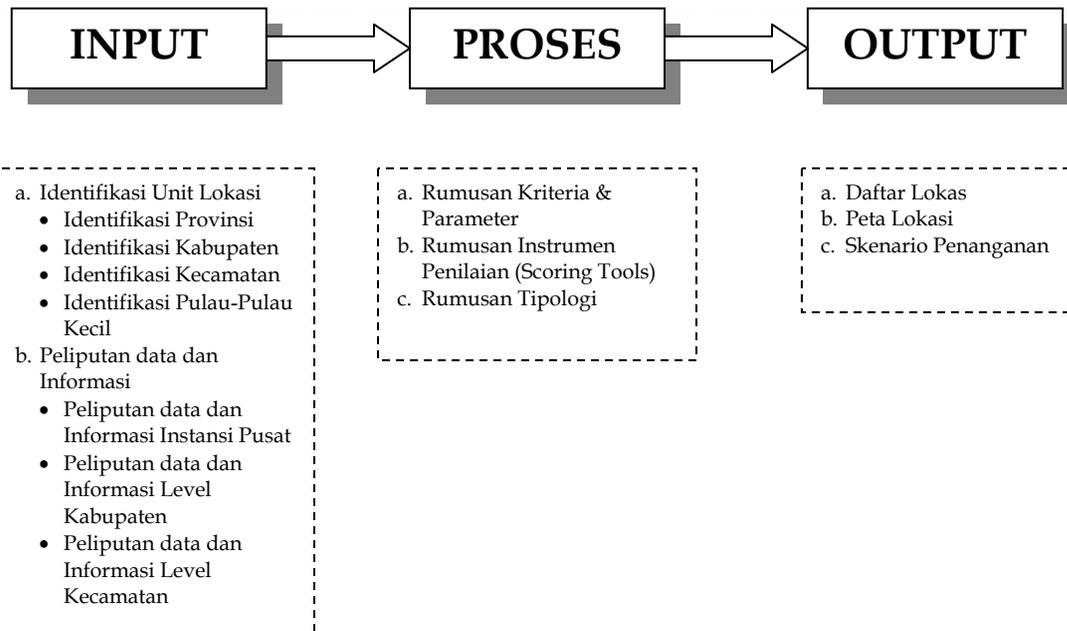
BAB II IDENTIFIKASI LOKASI

2.1. Gambaran Umum Kegiatan Identifikasi

Secara umum proses Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu studi yang terdiri dari 3 Aktivitas Utama:

1. **Input**, yaitu aktivitas menjabarkan (identifikasi) seluruh lokasi yang masuk dalam lingkup wilayah untuk dikaji sebagai masukan untuk kemudian disaring/diindikasi.
 - a. Identifikasi Provinsi
 - b. Identifikasi Kabupaten
 - c. Identifikasi Kecamatan
 - d. Identifikasi Unit Lokasi Kajian: Desa-Desa
 - e. Identifikasi Unit Lokasi Kajian: Pulau-Pulau Kecil
 - f. Peliputan data dan Informasi
 - g. Peliputan data dan Informasi Instansi Pusat
 - h. Peliputan data dan Informasi Level Kabupaten
 - i. Peliputan data dan Informasi Level Kecamatan
2. **Proses**, yaitu aktivitas penyaringan (*screening*) terhadap semua input (daftar lokasi yang diidentifikasi) menggunakan perangkat (*instrumen/tools*) yang ada berupa indikator untuk menghasilkan suatu output (daftar lokasi yang terindikasi)
 - a. Rumusan Kriteria & Parameter
 - b. Rumusan Instrumen Penilaian (*Scoring Tools*)
 - c. Rumusan Tipologi
3. **Output**, yaitu aktivitas penyimpulan keluaran berupa daftar lokasi terindikasi yang telah dihasilkan dari proses penyaringan (*screening*)
 - a. Daftar Lokasi
 - b. Peta Lokasi
 - c. Skenario Penanganan

Secara Skematis Gambaran Umum Proses Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil dapat dijelaskan sebagai berikut:



2.2. Penetapan Lokasi Kajian (Sebagai Input)

Sebelum melakukan Peliputan Data dan Informasi, secara jelas dan definitif dilakukan terlebih dahulu penetapan lokasi. Penetapan Lokasi Kajian terkait dengan Kriteria yang telah ditetapkan untuk masing-masing permasalahan baik Desa Terpencil, Desa Tertinggal ataupun Pulau-Pulau Kecil.

Untuk lebih jelas, berikut penjelasan penetapan lokasi kajian untuk tiap permasalahan:

2.2.1. Inventarisir Daftar Desa yang akan Didata

Sebelum melakukan peliputan data dan informasi sebagai bahan analisa untuk menyaring desa-desa yang masuk kriteria terpencil atau tertinggal, terlebih dahulu perlu dilakukan inventarisir daftar desa-desa yang terdapat dalam kabupaten/kota terpilih. Keseluruhan desa-desa dalam kabupaten/kota ini selanjutnya merupakan input, dan kesemuanya akan didata serta dinilai sesuai dengan perangkat penilaian yang telah ditetapkan dalam buku panduan ini.

2.2.2. Inventarisir Pulau-Pulau Kecil yang akan Didata

Demikian juga untuk pulau-pulau kecil, sebelum melakukan peliputan data dan informasi sebagai bahan analisa untuk menyaring pulau-pulau kecil yang masuk kriteria, terlebih dahulu perlu dilakukan inventarisir daftar pulau-pulau kecil yang terdapat dalam kabupaten/kota terpilih. Keseluruhan pulau-pulau kecil dalam kabupaten/kota ini selanjutnya merupakan input, dan kesemuanya akan didata serta dinilai sesuai dengan perangkat penilaian yang telah ditetapkan dalam buku panduan ini.

2.3. Tata Cara Peliputan Data dan Informasi

2.3.1. Peliputan Sekunder

Peliputan Sekunder merupakan peliputan data dan informasi menggunakan data-data sekunder yang telah ada.

A. Sumber Data

Peliputan data sekunder dilakukan pada instansi-instansi terkait sesuai dengan data yang dibutuhkan, antara lain:

1. Data **Statistik** (misalnya: *Kabupaten dalam Angka*) dapat diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) baik Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota.
2. Data **Infrastruktur** (misalnya: *Peta Infratraktur*) dapat diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda.
3. Data **Penataan Ruang** (misalnya: *RTRW-K*) dapat diperoleh dari Dinas Penataan Ruang atau Bappeda
4. Data **Kebijakan Pembangunan** (misalnya: *RPJM-K*) dapat diperoleh dari Bappeda atau Bagian Hukum
5. Data **Pulau-Pulau Kecil** dapat diperoleh dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Bakosurtanal, Departemen Dalam Negeri, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten atau Bappeda.

B. Tata Cara

Peliputan data sekunder dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan checklist data dan informasi yang dibutuhkan

2. Menyampaikan maksud dan tujuan Peliputan melalui Surat Permohonan kepada instansi tertuju
3. Menemui pihak yang berwenang mengeluarkan data
4. Meliput Data dan Informasi yang dibutuhkan, dengan cara menggandakan, merekam atau mencatat.

2.3.2. Peliputan Primer

Peliputan Primer merupakan peliputan data dan informasi secara langsung pada sumbernya, menggunakan metode wawancara, jajak pendapat, pengukuran dan pengamatan.

A. Sumber Data

Peliputan data primer dilakukan pada sumber-sumber terkait sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan, antara lain:

1. **Instansi Pusat**, terkait dengan kebutuhan data dan informasi mengenai Kebijakan Pembangunan Nasional untuk :
 - a. Daerah Tertinggal (Kementerian daerah Tertinggal)
 - b. Pembangunan Infrastruktur (Departemen Pekerjaan Umum)
 - c. Pulau-Pulau Kecil (Departemen Kelautan dan Perikanan)
 - d. Pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional)
2. **Instansi Provinsi**, terkait dengan kebutuhan data dan informasi mengenai Kebijakan Pembangunan daerah Provinsi.
3. **Instansi Kabupaten**, terkait dengan kebutuhan data dan informasi mengenai Gambaran Umum dan Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten, antara lain:
 - a. Gambaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten (dalam konteks desa)
 - b. Gambaran Umum Karakteristik Kabupaten (dalam konteks desa)
 - c. Gambaran Permasalahan Pembangunan Kabupaten (dalam konteks desa)
 - d. Gambaran Potensi Kabupaten (dalam konteks desa)
 - e. Gambaran Perekonomian (dalam konteks desa)
 - f. Gambaran Pendidikan (dalam konteks desa)
 - g. Gambaran Produktivitas (dalam konteks desa)
 - h. Daftar Kecamatan, Desa dan Pulau Kecil yang diidentifikasi terpencil, tertinggal.
4. **Instansi Kecamatan**, terkait dengan kebutuhan data dan informasi mengenai Gambaran Umum dan Keadaan Masyarakat di Kecamatan, antara lain:
 - a. Gambaran Umum Kecamatan (dalam konteks desa)

- b. Gambaran Sarana dan Prasarana Kecamatan (dalam konteks desa)
- c. Gambaran Perekonomian Masyarakat (dalam konteks desa)
- d. Gambaran Pendidikan Masyarakat (dalam konteks desa)
- e. Gambaran Produktivitas Masyarakat (dalam konteks desa)
- f. Gambaran Potensi Kecamatan (dalam konteks desa)
- g. Daftar Desa dan Pulau Kecil yang diidentifikasi terpencil, tertinggal.

B. Tata Cara

Peliputan data primer dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan checklist data dan informasi yang dibutuhkan
2. Menyiapkan instrumen peliputan data dan informasi yaitu *questionnaire* baik untuk tingkat Kabupaten maupun Kecamatan
3. Menyampaikan maksud dan tujuan Peliputan melalui Surat Permohonan kepada instansi tertuju
4. Menemui sumber yang menjadi sasaran peliputan data dan informasi
5. Meliput Data dan Informasi yang dibutuhkan, dengan cara wawancara, jajak pendapat maupun pengamatan

C. Format Questionnaire

Instrumen untuk melakukan jajak pendapat maupun wawancara yaitu menggunakan *questionnaire* yang terdiri dari susunan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan. Format *questionnaire* yang digunakan yaitu *questionnaire* tingkat kabupaten dan *questionnaire* tingkat kecamatan.

Format *questionnaire* untuk tingkat kabupaten dan kecamatan dapat mengacu pada contoh yang dilampirkan bersama buku ini.

2.3.3. Hasil Peliputan Data dan Informasi

berdasarkan hasil peliputan data dan informasi yang dilakukan, Hasil Data dan Informasi yang didapatkan antara lain:

1. Data dan Informasi Sekunder:
 - a. Data Statistik
 - b. Data Infrastruktur
 - c. Data Penataan Ruang
 - d. Data Kebijakan Pembangunan

- e. Data Pulau-Pulau Kecil
2. Data dan Informasi Primer Tingkat Pusat:
 - a. Kebijakan Pembangunan Nasional setiap instansi
3. Data dan Informasi Primer Tingkat Provinsi:
 - a. Kebijakan Pembangunan Provinsi
4. Data dan Informasi Primer Tingkat Kabupaten:
 - a. Gambaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten (dalam konteks desa)
 - b. Gambaran Umum Karakteristik Kabupaten (dalam konteks desa)
 - c. Gambaran Permasalahan Pembangunan Kabupaten (dalam konteks desa)
 - d. Gambaran Potensi Kabupaten (dalam konteks desa)
 - e. Gambaran Perekonomian (dalam konteks desa)
 - f. Gambaran Pendidikan (dalam konteks desa)
 - g. Gambaran Produktivitas (dalam konteks desa)
 - h. Daftar Kecamatan, Desa dan Pulau Kecil yang diidentifikasi terpencil, tertinggal.
5. Data dan Informasi Primer Tingkat Kabupaten:
 - a. Gambaran Umum Kecamatan (dalam konteks desa)
 - b. Gambaran Sarana dan Prasarana Kecamatan (dalam konteks desa)
 - c. Gambaran Perekonomian Masyarakat (dalam konteks desa)
 - d. Gambaran Pendidikan Masyarakat (dalam konteks desa)
 - e. Gambaran Produktivitas Masyarakat (dalam konteks desa)
 - f. Gambaran Potensi Kecamatan (dalam konteks desa)
 - g. Daftar Desa dan Pulau Kecil yang diidentifikasi terpencil, tertinggal.

BAB III IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERPENCIL

3.1. Definisi Desa Terpencil

Dalam kegiatan ini, yang dimaksud dengan **Desa Terpencil** merupakan Kawasan Perdesaan yang terisolasi dari Pusat Pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan Sarana (Infrastruktur) Perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/ perkembangan kawasan.

3.2. Kriteria Desa Terpencil

Atas dasar definisi yang ditetapkan di atas, **Kriteria** untuk menentukan (mengindikasikan) Desa Terpencil dalam kegiatan ini yaitu:

- Daerah perdesaan (unit administratif desa)
- Sarana/ Infrastruktur Aksesibilitas Kurang/Tidak Ada
 - Jalan
 - Jembatan
- Secara Geografis Jauh dari Pusat Pertumbuhan
- Ada Isolasi Geografis yang memisahkan dari daerah lain

3.3. Parameter Desa Terpencil Berdasarkan Kriteria

Untuk Desa terpencil, penetapan Parameter sebagai indikator kuantitatif untuk tiap Kriteria yang bersifat kualitatif yaitu:

1. Kawasan Permukiman
 - Kriteria: *Kawasan perdesaan*
Parameter: *Unit Administratif Desa*
2. Aksesibilitas
 - Kriteria: *Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas (Jalan/Jembatan/Dermaga)*
Parameter: *Tidak Ada*
3. Jarak

- Kriteria: *Jarak dari Pusat Pertumbuhan*
Parameter: *Lebih dari (>) 100 Km*
4. Isolasi Geografis
- Kriteria: *Faktor Isolasi Geografis*
Parameter: *Ada*

3.4. Instrumen Penilaian (*Scoring Tools*) Desa Terpencil

Untuk Desa terpencil, penetapan Penilaian (*Scoring*) untuk tiap Kriteria dan Parameternya yaitu:

1. Kawasan Permukiman
 - Kriteria: *Kawasan perdesaan*
Parameter: *Unit Administratif Desa*
2. Aksesibilitas
 - Kriteria: *Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas (Jalan/Jembatan/Dermaga/Bandar Udara)*
Parameter: *Tidak Ada, Nilainya: 0 (Rendah)*
Ada, Nilainya: 1 (Sedang)
Ada > 1, Nilainya: 2 (Tinggi)
3. Jarak
 - Kriteria: *Jarak dari Pusat Pertumbuhan*
Parameter: *Lebih dari (>) 100 Km, Nilainya: 1 (Rendah)*
Antara 50-100 Km, Nilainya: 2 (Sedang)
Kurang dari (<) 50 Km, Nilainya: 3 (Tinggi)
4. Isolasi Geografis
 - Kriteria: *Faktor Isolasi (Geografis)*
Parameter: *Ada > 1, Nilainya: 1 (Rendah)*
Ada, Nilainya: 2 (Sedang)
Tidak Ada, Nilainya: 3 (Tinggi)

Untuk melihat Rumusan Instrumen Penilaian (*Scoring Tools*) Desa Terpencil dalam bentuk tabulasi, dapat dilihat pada *Tabel Rumusan Instrumen Penilaian (Scoring Tools) Desa Terpencil* berikut ini.

INSTRUMEN PENILAIAN (SCORING TOOLS)
KRITERIA & PARAMETER SECARA KUALITATIF DAN KUANTITAF (KLASIFIKASI DESA TERPENCIL)
KEGIATAN IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERPENCIL, DESA TERTINGGAL DAN PULAU-PULAU KECIL

| KRITERIA | PENILAIAN PARAMETER SECARA KUANTITATIF | | | PENILAIAN KRITERIA & PARAMETER (Rata2) | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 KAWASAN PERMUKIMAN > Unit Administratif DESA | | | | | | |
| 2 SARANA AKSESIBILITAS > Jalan antar kawasan > Jembatan antar kawasan > dermaga antar kawasan | Tidak Ada 0 | Ada 1 | Ada > 1 2 | 0 Rendah | 1 Sedang | 2 Tinggi |
| 3 JARAK > Jarak dari pusat pertumbuhan - Pusat Kabupaten - Pusat Kota - Kecamatan Lain | >100 Km 1 | 50-100 Km 2 | < 50 Km 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |
| 4 ISOLASI GEOGRAFIS > Sungai > Gunung > Lembah > DII | Ada > 1 1 | Ada 2 | Tidak Ada 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |

3.5. Rumusan Kelompok Tipologi Desa Terpencil

Pengelompokan Tipologi untuk Desa Terpencil didasarkan pada kriteria penilaian desa terpencil yang telah dijelaskan terdahulu. Berdasarkan simulasi terhadap penilaian kriteria-kriteria tersebut, maka dapat dirumuskan pengelompokan tipologi untuk Desa Terpencil adalah sebagai berikut:

1. Type A (*Terpencil karena Ketiadaan Sarana Aksesibilitas*)
 - Kawasan perdesaan yang terisolasi oleh sebab Tidak Tersedianya Sarana Aksesibilitas yang menghubungkan Kawasan tersebut dengan Pusat Pertumbuhan
2. Type B (*Terpencil karena Jarak*)
 - Kawasan perdesaan yang terisolasi oleh sebab secara geografis jaraknya jauh dari Pusat Pertumbuhan
3. Type C (*Terpencil karena Isolasi Geografis*)
 - Kawasan perdesaan yang terisolasi oleh sebab keberadaan Isolasi Geografis yang memisahkan kawasan tersebut dengan Pusat Pertumbuhan
4. Type D (*Terpencil karena Alasan Khusus*)
 - Kawasan perdesaan yang terisolasi oleh sebab khusus, misalnya Pengaruh Adat Istiadat → Memencilkan Diri

Rumusan Pengelompokan Tipologi yang telah dijabarkan di atas dengan berbagai kemungkinannya secara lebih jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel Rumusan Berbagai Kemungkinan Tipologi Desa Terpencil berikut.

RUMUSAN BERBAGAI KEMUNGKINAN TIPOLOGI BERDASARKAN KRITERIA DAN PARAMETER DESA TERPENCIL

| NO | KLASIFIKASI I DESA TERPENCIL | TYPE A (Terpencil karena Sarana Aksesibilitas) | | | | TYPE B (Terpencil karena Jarak) | | TYPE C (Terpencil karena Geografis) |
|------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | C1 |
| 1 | SARANA AKSESIBILITAS | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | JARAK | Jauh | Jauh | Dekat | Dekat | Jauh | Jauh | Dekat |
| 3 | ISOLASI GEOGRAFIS | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada |
| PRIORITAS PENANGANAN = | | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 |

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

Kelompok Tipe A memiliki 4 varian, yaitu:

- Tipologi A1, desa yang tidak memiliki sarana aksesibilitas, jauh dari pusat pertumbuhan dan memiliki isolasi geografis
- Tipologi A2, desa desa yang tidak memiliki sarana aksesibilitas, jauh dari pusat pertumbuhan namun tidak memiliki isolasi geografis
- Tipologi A3, desa yang tidak memiliki sarana aksesibilitas, dekat dari pusat pertumbuhan namun memiliki isolasi geografis
- Tipologi A4, desa yang tidak memiliki sarana aksesibilitas, namun dekat dari pusat pertumbuhan dan tidak memiliki isolasi geografis

Kelompok Tipe B memiliki 2 varian, yaitu:

- Tipologi B1, desa yang memiliki sarana aksesibilitas, namun jauh dari pusat pertumbuhan dan memiliki isolasi geografis
- Tipologi B2, desa yang memiliki sarana aksesibilitas, namun jauh dari pusat pertumbuhan dan tidak memiliki isolasi geografis

Kelompok Tipe C memiliki 1 varian, yaitu:

- Tipologi C1, desa yang memiliki sarana aksesibilitas, dekat dari pusat pertumbuhan namun memiliki isolasi geografis

Kelompok Tipe D tidak dijelaskan dalam tabel, karena Tipe D bersifat khusus dengan penanganan yang kasuistis.

BAB IV IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERTINGGAL

4.1. Definisi Desa Tertinggal

Dalam kegiatan ini, yang dimaksud dengan **Desa Tertinggal** merupakan Kawasan Perdesaan yang ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayahnya kurang/tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan).

4.2. Kriteria Desa Tertinggal

Atas dasar definisi yang ditetapkan di atas, **Kriteria** untuk menentukan (mengindikasikan) Desa Tertinggal dalam kegiatan ini yaitu:

- Daerah perdesaan (unit administratif desa)
- Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada:
 - Air Bersih,
 - Listrik,
 - Irigasi
- Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada:
 - Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri)
 - Sarana Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan)
 - Sarana Transportasi: (Terminal, Stasiun, Bandara, dll)
- Perekonomian masyarakat rendah (Miskin/Pra Sejahtera)
- Tingkat Pendidikan Rendah (Terbelakang/Pendidikan kurang dari 9 tahun)
- Produktivitas Masyarakat Rendah (Pengangguran pada usia produktif)

4.3. Parameter Desa Tertinggal Berdasarkan Kriteria

Untuk Desa tertinggal, penetapan Parameter sebagai indikator kuantitatif untuk tiap Kriteria yang bersifat kualitatif yaitu:

1. Kawasan Permukiman
 - Kriteria: *Kawasan perdesaan*
Parameter: *Unit Administratif Desa*
2. Prasarana Dasar Wilayah
 - Kriteria: *Jaringan Air Bersih*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 - Kriteria: *Jaringan Listrik*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 - Kriteria: *Jaringan Irigasi*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
3. Sarana Wilayah
 - Kriteria: *Sarana Ekonomi (Pasar, Pertokoan, PKL, dll)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 - Kriteria: *Sarana Industri (Industri RT, Industri Menengah, Industri Besar)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 - Kriteria: *Sarana Kesehatan (RSD, Puskesmas, Pustu, dll)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 - Kriteria: *Sarana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMU)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 - Kriteria: *Sarana transportasi (Terminal, Stasiun)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
4. Kondisi Kehidupan Masyarakat
 - Kriteria: *Perekonomian masyarakat*
Parameter: *Jumlah Penduduk Miskin lebih dari (>) 50 %*
 - Kriteria: *Tingkat Pendidikan*
Parameter: *Tingkat Pendidikan Penduduk kurang dari (<) SMP lebih dari (>) 50%*
 - Kriteria: *Produktivitas Masyarakat*
Parameter: *Penduduk Menganggur lebih dari (>) 50%*

4.4. Instrumen Penilaian (Scoring Tools) Desa Tertinggal

Untuk Desa Tertinggal, penetapan Penilaian (Scoring) untuk tiap Kriteria dan Parameternya yaitu:

1. Kawasan Permukiman



- Kriteria: *Kawasan perdesaan*
Parameter: *Unit Administratif Desa*
2. Prasarana Dasar Wilayah
- Kriteria: *Jaringan Air Bersih*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3
 - Kriteria: *Jaringan Listrik*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3
 - Kriteria: *Jaringan Irigasi*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3
3. Sarana Wilayah
- Kriteria: *Sarana Ekonomi (Pasar, Pertokoan, PKL, dll)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3
 - Kriteria: *Sarana Industri (Industri RT, Industri Menengah, Industri Besar)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3
 - Kriteria: *Sarana Kesehatan (RSD, Puskesmas, Pustu, dll)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3
 - Kriteria: *Sarana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMU)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3

- Kriteria: *Sarana transportasi (Terminal, Stasiun)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3
- 4. Kondisi Kehidupan Masyarakat
 - Kriteria: *Perekonomian masyarakat*
Parameter: *Jumlah Penduduk Miskin lebih dari (>) 50 %*, Nilainya: 1
Jumlah Penduduk Miskin antara 25% - 50 %, Nilainya: 2
Jumlah Penduduk Miskin kurang dari (<) 25 %, Nilainya: 3
 - Kriteria: *Tingkat Pendidikan*
Parameter: *Tingkat Pendidikan Penduduk (<) SMP lebih dari (>) 50%*, Nilainya: 1
Tingkat Pendidikan Penduduk (<) SMP antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Tingkat Pendidikan Penduduk (<) SMP kurang dari (<) 25%, Nilainya: 3
 - Kriteria: *Produktivitas Masyarakat*
Parameter: *Penduduk Menganggur lebih dari (>) 50%*, Nilainya: 1
Penduduk Menganggur antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Penduduk Menganggur kurang dari (<) 25%, Nilainya: 3

Untuk melihat Rumusan Instrumen Penilaian (*Scoring Tools*) Desa Tertinggal dalam bentuk tabulasi, dapat dilihat pada *Tabel Rumusan Instrumen Penilaian (Scoring Tools) Desa Tertinggal* berikut.

INSTRUMEN PENILAIAN (SCORING TOOLS)
KRITERIA & PARAMETER SECARA KUALITATIF DAN KUANTITATIF (KLASIFIKASI DESA TERTINGGAL)
KEGIATAN IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERPENCIL, DESA TERTINGGAL DAN PULAU-PULAU KECIL

| KRITERIA | PENILAIAN PARAMETER SECARA KUANTITATIF | | | PENILAIAN KRITERIA & PARAMETER (Rata2) | | |
|--|---|---|--|--|-------------|-------------|
| 1 KAWASAN PERMUKIMAN > Unit Administratif DESA | | | | | | |
| 2 INFRASTRUKTUR (SARANA & PRASARANA WILAYAH) | | | | | | |
| A Prasarana Dasar Wilayah : | | | | | | |
| > Air Bersih | thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 | thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 | thd luas kawasan, pelayanan > 60% 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |
| > Listrik | thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 | thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 | thd luas kawasan, pelayanan > 60% 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |
| > Irigasi | thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 | thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 | thd luas kawasan, pelayanan > 60% 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |
| B Sarana Wilayah : | | | | | | |
| > Sarana Ekonomi | thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 | thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 | thd luas kawasan, pelayanan > 60% 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |
| > Sarana Industri | thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 | thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 | thd luas kawasan, pelayanan > 60% 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |
| > Sarana Puskesmas | thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 | thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 | thd luas kawasan, pelayanan > 60% 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |
| > Sarana Pendidikan | thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 | thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 | thd luas kawasan, pelayanan > 60% 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |
| > Sarana transportasi | thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 | thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 | thd luas kawasan, pelayanan > 60% 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |
| 3 KEHIDUPAN MASYARAKAT | | | | | | |
| A Perekonomian masyarakat | | | | | | |
| > Persen Keluarga Pra Sejahtera | Keluarga Pra Sejahtera= > 50 % 1 | Keluarga Pra Sejahtera= 25 % - 50 % 2 | Keluarga Pra Sejahtera= < 25 % 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |
| B Pendidikan Masyarakat | | | | | | |
| > Persen Pendidikan dibawah 9 tahun | Penduduk Pendidikan < SMP= > 50 % 1 | Penduduk Pendidikan < SMP= 25 % - 50 % 2 | Penduduk Pendidikan < SMP= < 25 % 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |
| C Produktivitas Masyarakat | | | | | | |
| > Persen Penganggur Usia Produktif | Penganggur= >50% 1 | Penganggur= 25 % - 50 % 2 | Penganggur= < 25 % 3 | 1 Rendah | 2 Sedang | 3 Tinggi |

4.5. Rumusan Kelompok Tipologi Desa Tertinggal

Pengelompokan Tipologi untuk Desa Tertinggal didasarkan pada kriteria penilaian desa tertinggal yang telah dijelaskan terdahulu. Berdasarkan simulasi terhadap penilaian kriteria-kriteria tersebut, maka dapat dirumuskan pengelompokan tipologi untuk Desa Tertinggal adalah sebagai berikut:

1. Type A (*Kawasan yang Prasarana Dasar Wilayahnya Tertinggal*)
 - Kawasan perdesaan yang ketersediaan Prasarana Dasar Wilayahnya kurang
2. Type B (*Kawasan yang Sarana Wilayahnya Tertinggal*)
 - Kawasan perdesaan yang ketersediaan Prasarana Dasar Wilayahnya tercukupi,
 - Namun Ketersediaan Sarana Wilayahnya kurang
3. Type C (*Kawasan yang Kehidupan Masyarakatnya Tertinggal*)
 - Kawasan perdesaan yang ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayahnya tercukupi,

- Namun Kehidupan Masyarakatnya Rendah

Rumusan Pengelompokan Tipologi yang telah dijabarkan di atas dengan berbagai kemungkinannya secara lebih jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel Rumusan Berbagai Kemungkinan Tipologi Desa Tertinggal berikut.

RUMUSAN BERBAGAI KEMUNGKINAN TIPOLOGI BERDASARKAN KRITERIA DAN PARAMETER
DESA TERTINGGAL

| NO | KLASIFIKASI II DESA TERTINGGAL | TYPE A (Tertinggal Prasarana Dasar Wilayah) | | | | TYPE B (Tertinggal Sarana Wilayah) | | TYPE C (Tertinggal Kehidupan Masyarakatnya) |
|----|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | C1 |
| 1 | PRASARANA DASAR WILAYAH | Rendah | Rendah | Rendah | Rendah | Cukup | Cukup | Cukup |
| 2 | SARANA WILAYAH | Rendah | Rendah | Cukup | Cukup | Rendah | Rendah | Cukup |
| 3 | KEHIDUPAN MASYARAKAT | Rendah | Cukup | Rendah | Cukup | Rendah | Cukup | Rendah |
| | PRIORITAS PENANGANAN = | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

Kelompok Tipe A memiliki 4 varian, yaitu:

- Tipologi A1, desa yang ketersediaan prasarana dasar wilayahnya rendah, ketersediaan sarana wilayahnya rendah dan kehidupan masyarakatnya rendah
- Tipologi A2, desa yang ketersediaan prasarana dasar wilayahnya rendah, ketersediaan sarana wilayahnya rendah namun kehidupan masyarakatnya cukup
- Tipologi A3, desa yang ketersediaan prasarana dasar wilayahnya rendah, ketersediaan sarana wilayahnya cukup namun kehidupan masyarakatnya rendah
- Tipologi A4, desa yang ketersediaan prasarana dasar wilayahnya rendah, namun ketersediaan sarana wilayahnya cukup dan kehidupan masyarakatnya cukup

Kelompok Tipe B memiliki 2 varian, yaitu:

- Tipologi B1, desa yang ketersediaan prasarana dasar wilayahnya cukup, namun ketersediaan sarana wilayahnya rendah dan kehidupan masyarakatnya rendah
- Tipologi B2, desa yang ketersediaan prasarana dasar wilayahnya cukup, namun ketersediaan sarana wilayahnya rendah dan kehidupan masyarakatnya cukup

Kelompok Tipe C memiliki 1 varian, yaitu:

- Tipologi C1, desa yang ketersediaan prasarana dasar wilayahnya cukup, namun ketersediaan sarana wilayahnya cukup namun kehidupan masyarakatnya rendah

BAB V IDENTIFIKASI LOKASI PULAU-PULAU KECIL

5.1. Definisi Pulau-Pulau Kecil

Dalam kegiatan ini, yang dimaksud dengan **Pulau-Pulau Kecil** merupakan Suatu daratan yang pada saat pasang tertinggi tidak tertutupi air, dengan luas kurang dari 2.000 Km², memiliki komunitas permukiman, memiliki keterbatasan sarana aksesibilitas dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayahnya kurang/tidak ada,

5.2. Kriteria Pulau-Pulau Kecil

Atas dasar definisi yang ditetapkan di atas, **Kriteria** untuk menentukan (mengindikasikan) Pulau-Pulau Kecil dalam kegiatan ini yaitu:

- Pulau dengan Luas < 2.000 Km²
- Memiliki Unit Komunitas (RT, RW, Desa, dst)
- Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas Kurang/Tidak Ada
 - Dermaga
 - Bandar Udara
- Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada:
 - Air Bersih,
 - Listrik,
- Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada:
 - Sarana Bidang Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri)
 - Sarana Bidang Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan)
 - Sarana Transportasi Lokal

5.3. Parameter Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Kriteria

Untuk pulau-pulau kecil, penetapan Parameter sebagai indikator kuantitatif untuk tiap Kriteria yang bersifat kualitatif yaitu:

1. Pulau Kecil (memiliki Permukiman)

- Kriteria: *Pulau*
Parameter: *Luas < 2.000 Km²*
 - Kriteria: *Memiliki Unit Komunitas*
Parameter: *Ada Unit Administratif (RT, RW, Desa, dst)*
2. Aksesibilitas
 - Kriteria: *Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas (Dermaga/Bandar Udara)*
Parameter: *Tidak Ada*
 3. Prasarana Dasar Wilayah
 - Kriteria: *Jaringan Air Bersih*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 - Kriteria: *Jaringan Listrik*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 4. Sarana Wilayah
 - Kriteria: *Sarana Ekonomi (Pasar, Pertokoan, PKL, dll)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 - Kriteria: *Sarana Industri (Industri RT, Industri Menengah, Industri Besar)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 - Kriteria: *Sarana Kesehatan (RSD, Puskesmas, Pustu, dll)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 - Kriteria: *Sarana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMU)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*
 - Kriteria: *Sarana transportasi (Terminal, Stasiun)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*

5.4. Instrumen Penilaian (*Scoring Tools*) Pulau-Pulau Kecil

Untuk Pulau-Pulau Kecil, penetapan Penilaian (*Scoring*) untuk tiap Kriteria dan Parameternya yaitu:

1. Pulau Kecil (memiliki Permukiman)
 - Kriteria: *Pulau*
Parameter: *Luas < 2.000 Km²*
 - Kriteria: *Memiliki Unit Komunitas*
Parameter: *Ada Unit Administratif (RT, RW, Desa, dst)*
2. Aksesibilitas

- Kriteria: *Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas (Dermaga/Bandar Udara)*
Parameter: *Tidak Ada*, Nilainya: 0 (Rendah)
Ada, Nilainya: 1 (Sedang)
Ada > 1, Nilainya: 2 (Tinggi)

3. Prasarana Dasar Wilayah

- Kriteria: *Jaringan Air Bersih*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3
- Kriteria: *Jaringan Listrik*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3

Kesimpulan **Prasarana Dasar Wilayah (no. 3)** atas total:

- Rata-rata 1,0 – 1,9 = Rendah
- Rata-rata 2,0 – 2,9 = Sedang
- Rata-rata 3 = Tinggi

4. Sarana Wilayah

- Kriteria: *Sarana Ekonomi (Pasar, Pertokoan, PKL, dll)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3
- Kriteria: *Sarana Industri (Industri RT, Industri Menengah, Industri Besar)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3
- Kriteria: *Sarana Kesehatan (RSD, Puskesmas, Pustu, dll)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2
Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3
- Kriteria: *Sarana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMU)*
Parameter: *Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %*, Nilainya: 1
Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2

Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3

- Kriteria: Sarana transportasi (Terminal, Stasiun)

Parameter: Pelayanan terhadap Luas Kawasan kurang dari (<) 25 %, Nilainya: 1

Pelayanan terhadap Luas Kawasan antara 25% - 50%, Nilainya: 2

Pelayanan terhadap Luas Kawasan lebih dari (>) 50%, Nilainya: 3

Kesimpulan **Sarana Wilayah (no. 4)** atas total:

- Rata-rata 1,0 – 1,9 = Rendah
- Rata-rata 2,0 – 2,9 = Sedang
- Rata-rata 3 = Tinggi

Untuk melihat Rumusan Instrumen Penilaian (*Scoring Tools*) Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk tabulasi, dapat dilihat pada *Tabel Rumusan Instrumen Penilaian (Scoring Tools) Pulau-Pulau Kecil* berikut.

INSTRUMEN PENILAIAN (*SCORING TOOLS*)
KRITERIA & PARAMETER SECARA KUALITATIF DAN KUANTITATIF (*KLASIFIKASI PULAU-PULAU KECIL*)
KEGIATAN IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERPENCIL, DESA TERTINGGAL DAN PULAU-PULAU KECIL

| KRITERIA | PENILAIAN PARAMETER SECARA KUANTITATIF | | | PENILAIAN KRITERIA & PARAMETER (Rata2) | | |
|--|---|--|--|--|----------------------------|--------------------|
| 1 PULAU KECIL > Pulau Luas < 2.000 Km ² > Unit Administratif (RT, RW, Desa, dst) | | | | | | |
| 2 SARANA AKSESIBILITAS > dermaga antar kawasan > bandara | Tidak Ada | Ada | Ada > 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 INFRASTRUKTUR (SARANA & PRASARANA WILAYAH) | | | | | | |
| A Prasarana Dasar Wilayah : > Air Bersih > Listrik | thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 | thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 | thd luas kawasan, pelayanan > 25% 3 thd luas kawasan, pelayanan > 25% 3 | 1,0 - 1,9 RENDAH | 2,0 - 2,9 SEDANG | 3 TINGGI |
| B Sarana Wilayah : > Sarana Ekonomi > Sarana Industri > Sarana Puskesmas > Sarana Pendidikan > Sarana transportasi | thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 thd luas kawasan, pelayanan < 25 % 1 | thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 thd luas kawasan, pelayanan 25 - 60 % 2 | thd luas kawasan, pelayanan > 25% 3 thd luas kawasan, pelayanan > 25% 3 | 1,0 - 1,9 RENDAH | 2,0 - 2,9 SEDANG | 3 TINGGI |

5.5. Rumusan Kelompok Tipologi Pulau-Pulau Kecil

Pengelompokan Tipologi untuk Pulau-Pulau Kecil didasarkan pada kriteria penilaian pulau-pulau kecil yang telah dijelaskan terdahulu. Berdasarkan simulasi terhadap penilaian kriteria-kriteria tersebut, maka dapat dirumuskan pengelompokan tipologi untuk pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut:

1. Type A (*Pulau-Pulau Kecil yang Terpencil*)
 - Pulau-Pulau Kecil yang memiliki Permukiman,
 - Tidak Tersedia Sarana Aksesibilitas untuk berhubungan dengan Kawasan lain
2. Type B (*Pulau-Pulau Kecil yang Tertinggal Prasarana Dasar Wilayahnya*)
 - Pulau-Pulau Kecil yang memiliki Permukiman dan ketersediaan Sarana Aksesibilitasnya cukup,
 - Ketersediaan Prasarana Dasar Wilayahnya kurang
3. Type C (*Pulau-Pulau Kecil yang Tertinggal Sarana Wilayahnya*)
 - Pulau-Pulau Kecil yang memiliki Permukiman serta Ketersediaan Sarana Aksesibilitas dan Prasarana Dasar Wilayahnya cukup,
 - Ketersediaan Sarana Wilayahnya kurang

Rumusan Pengelompokan Tipologi yang telah dijabarkan di atas dengan berbagai kemungkinannya secara lebih jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel Rumusan Berbagai Kemungkinan Tipologi Pulau-Pulau Kecil berikut.

RUMUSAN BERBAGAI KEMUNGKINAN TIPOLOGI BERDASARKAN KRITERIA DAN PARAMETER PULAU-PULAU KECIL

| NO | KLASIFIKASI III PULAU-PULAU KECIL | TYPE A (Pulau Kecil Terpencil) | | | | TYPE B (Pulau Kecil Tertinggal Prasarana Dasar Wilayah) | | TYPE C (Pulau Kecil Tertinggal Sarana Wilayah) |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|--------|--|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | C1 |
| 1 | SARANA AKSESIBILITAS | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | PRASARANA DASAR WILAYAH | Rendah | Rendah | Cukup | Cukup | Rendah | Rendah | Cukup |
| 3 | SARANA WILAYAH | Rendah | Cukup | Rendah | Cukup | Rendah | Cukup | Rendah |
| | PRIORITAS PENANGANAN = | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 18 |

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

Kelompok Tipe A memiliki 4 varian, yaitu:

- Tipologi A1, *Pulau Kecil yang Sarana Aksesibilitasnya tidak ada*, ketersediaan prasarana dasar wilayahnya rendah, dan ketersediaan sarana wilayahnya rendah

- Tipologi A2, Pulau Kecil yang Sarana Aksesibilitasnya tidak ada, ketersediaan prasarana dasar wilayahnya rendah, dan ketersediaan sarana wilayahnya cukup
- Tipologi A3, Pulau Kecil yang Sarana Aksesibilitasnya tidak ada, namun ketersediaan prasarana dasar wilayahnya cukup, dan ketersediaan sarana wilayahnya rendah
- Tipologi A4, Pulau Kecil yang Sarana Aksesibilitasnya tidak ada, namun ketersediaan prasarana dasar wilayahnya cukup, dan ketersediaan sarana wilayahnya cukup

Kelompok Tipe B memiliki 2 varian, yaitu:

- Tipologi B1, Pulau Kecil yang Sarana Aksesibilitasnya ada, namun ketersediaan prasarana dasar wilayahnya rendah, dan ketersediaan sarana wilayahnya rendah
- Tipologi B2, Pulau Kecil yang Sarana Aksesibilitasnya ada, namun ketersediaan prasarana dasar wilayahnya rendah, dan ketersediaan sarana wilayahnya cukup

Kelompok Tipe C memiliki 1 varian, yaitu:

- Tipologi C1, Pulau Kecil yang Sarana Aksesibilitasnya ada, ketersediaan prasarana dasar wilayahnya cukup, namun ketersediaan sarana wilayahnya rendah

BAB VI IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN POTENSI KAWASAN

6.1. Identifikasi Permasalahan

6.1.1. Permasalahan Desa Terpencil

Permasalahan yang menyebabkan suatu wilayah menjadi terisolasi (terpencil) antara lain:

1. **Pengaruh Geografis** yang membagi wilayah dalam berbagai keadaan/kondisi (Pulau, Pesisir, Dataran Rendah ataupun Dataran Tinggi) dengan pembatas alami seperti Laut, Sungai, Gunung, dan lain-lain.
2. **Kurangnya Sarana Aksesibilitas** yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain seperti Jalan, Jembatan, Dermaga atau Bandar Udara
3. **Gangguan Akibat Bencana** yang menyebabkan rusaknya Sarana Aksesibilitas yang telah ada
4. **Komunitas Adat Terpencil (KAT)** yang secara sadar memisahkan diri dari lingkungan sosial diluar wilayahnya (*Self Isolation*), serta menolak intervensi.

6.1.2. Permasalahan Desa Tertinggal

Permasalahan yang dihadapi Desa Tertinggal adalah sebagai berikut :

1. **Kualitas SDM** di Desa Tertinggal relatif lebih rendah di bawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
2. **Terbatasnya akses permodalan**, pasar, informasi dan teknologi bagi upaya pengembangan ekonomi lokal,
3. **Terdapat gangguan keamanan dan bencana** yang menyebabkan kondisi daerah tidak kondusif untuk berkembang;
4. **Komunitas adat terpencil (KAT)** memiliki akses yang sangat terbatas kepada pelayanan sosial ekonomi, dan politik serba terisolir dan wilayah di sekitarnya.
5. **Kebijakan pembangunan sebelumnya** yang kurang tepat sehingga terjadi kesenjangan dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan.

6.1.3. Permasalahan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil

Kendala dalam pembangunan pulau-pulau kecil karena karakteristik ekosistem yang dimilikinya, yakni;

1. **Ukuran yang kecil dan terisolasi** sehingga penyediaan prasarana dan sarana menjadi langka.
2. **Kesukaran atau ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi optimal** dan menguntungkan dalam hal administrasi, produksi dan transportasi.
3. **Keterbatasan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan**, seperti: air tawar, vegetasi, tanah, ekosistem pesisir dan satwa liar, yang pada akhirnya akan menentukan daya dukung pulau kecil untuk menopang kehidupan manusia dan segenap kegiatan pembangunannya.
4. **Aktivitas atau kegiatan** yang dilakukan pada suatu pulau, baik di darat maupun pada kawasan pesisir dan laut, akan mempengaruhi lingkungan pesisir, sehingga kegiatan tersebut harus dan perlu dikelola dengan baik, dengan memperhatikan ekosistem disekitarnya.
5. **Budaya lokal kepulauan** yang kadangkala bertentangan dengan kegiatan pembangunan. Contohnya: kegiatan pariwisata, yang akhir-akhir ini dianggap sebagai dewa penolong bagi pembangunan pulau-pulau kecil tetapi pada beberapa pulau kecil, budaya yang dibawa wisatawan dianggap tidak sesuai dengan kondisi setempat.

6.2. Identifikasi Potensi

6.2.1. Potensi Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis pantai (pesisir) yang sangat besar. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang secara fisik memiliki sumberdaya alam daratan yang terbatas, tetapi dikaruniai sumberdaya kelautan yang melimpah, merupakan aset wilayah yang strategis untuk dikembangkan dengan basis pada pemanfaatan sumberdaya kelautan dan jasa-jasa lingkungan lainnya.

Profil dan Karakter kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat khas dengan berbagai potensi yang mungkin dimilikinya, seperti antara lain:

1. **Potensi Keanekaragaman Endemik Bernilai Tinggi**

Ekosistem di kawasan pesisir terutama pulau-pulau kecil mempunyai nilai strategis tinggi, seperti terumbu karang, mangrove (hutan bakau), padang lamun, penyu, dan spesies lain yang mempunyai tingkat keunikan tinggi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatannya.

2. **Potensi Pariwisata**

Iklim dan pantai adalah daya tarik utama kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap wisatawan akan tetapi memerlukan investasi yang besar untuk pembangunan infrastruktur.

3. Potensi Perikanan dan Kelautan

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi perikanan yang sangat besar, karena aksesnya pada laut sangat terbuka. Namun perikanan pada pulau kecil kebanyakan berskala kecil. Kegiatan perikanan sering dihadapkan dengan masalah *cold storage*, pemasaran, alat tangkap tradisional bahkan kekurangan stok ikan.

4. Potensi Industri

Potensi industri untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil relatif masih cukup besar dengan akses pada bahan baku kelautan yang luas dan bernilai tinggi. Perkembangan industri akan sangat dipengaruhi pada ketersediaan bahan baku, permodalan, demand (permintaan) dan pemasaran. Namun khusus pada kasus pulau-pulau kecil, kecilnya pulau merupakan kendala yang serius dalam pembangunan industri.

5. Potensi Perdagangan

Perkembangan kebudayaan-kebudayaan lama umumnya dimulai dari wilayah pesisir yang ditandai dengan keberadaan kota-kota lama pada wilayah tepian laut. Penyebabnya yang paling utama adalah karena aksesibilitas pada kawasan pesisir paling mudah, sehingga untuk melakukan hubungan dengan kawasan lain lebih mudah, termasuk dalam bidang perdagangan.

6.2.2. Potensi Kawasan Non Pesisir

Di luar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pada kawasan pedalaman baik dataran rendah maupun dataran tinggi, potensi yang mungkin dimiliki suatu kawasan dapat beraneka ragam berdasarkan sumber daya yang dimiliki baik SDA maupun SDM. Aset potensi yang dimiliki harus dipetakan dan diperhitungkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan masyarakat.

1. Potensi Pariwisata

Lokasi suatu daerah yang menawan (eksotis), dengan keadaan alam yang indah dan didukung dengan keadaan iklim yang nyaman merupakan suatu aset Alami bernilai tinggi. Keadaan SDA seperti inilah yang dapat menjadi potensi suatu daerah. Selain itu aset seperti situs-situs peninggalan bersejarah dengan nilai historis yang tinggi juga dapat menjadi daya tarik suatu daerah.

2. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Sektor Pertanian dan Perkebunan diindikasikan sebagai bidang paling utama kawasan pedesaan. Kawasan pedesaan salah satu cirinya adalah sebagian besar angkatan kerjanya memperoleh mata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, sehingga pendapatan sebagian besar berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Keuntungan yang dimiliki kawasan pedesaan adalah

ketersediaan lahan sangat untuk dapat dimanfaatkan. Sehingga penekanan dan konsentrasi pada sektor pertanian dan perkebunan dapat memberikan keuntungan yang besar pada perekonomian.

3. Potensi Kehutanan

Pada wilayah dengan ketersediaan hutan produksi merupakan aset yang besar untuk wilayah tersebut. Tidak semua wilayah memiliki keuntungan seperti ini. Berbagai jenis hasil kehutanan seperti beragam jenis kayu memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dengan lingkup pelayanan pemasaran yang cukup luas. Suatu daerah dengan keunggulan seperti ini selayaknya dapat memetakan dan memperhitungkan kontribusinya pada perekonomian daerahnya.

4. Potensi Peternakan

Sektor peternakan diidentifikasi terdiri dari ternak besar, seperti Sapi dan kerbau; ternak kecil, seperti kambing, domba dan babi; serta ternak unggas, seperti ayam, itik dan burung. Sektor peternakan seperti halnya sektor pertanian juga merupakan sektor yang umumnya mendominasi mata pencaharian di kawasan pedesaan. Sebagian besar pendapatan masyarakat juga berasal dari sektor peternakan sejalan dengan sektor pertanian.

Hasil yang didapatkan dari sektor peternakan adalah kapasitas produksi daging pada daerah bersangkutan. Besarnya produksi daerah menentukan peran daerah tersebut dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat, perdagangan dan ekspor.

5. Potensi Perikanan Air Tawar

Tidak hanya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat memiliki potensi perikanan, daerah pedalaman baik dataran rendah maupun tinggi juga dapat memiliki potensi perikanan. Bedanya adalah potensi perikanan yang dapat dimiliki daerah pedalaman adalah perikanan air tawar yang didapat dari sungai, danau ataupun hasil budidaya tambak. Walaupun hasil perikanan tidak sebesar perikanan laut, namun hasil produksinya cukup memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dan perekonomian.

6. Potensi Pertambangan dan Energi

Ketersediaan pertambangan dan energi pada suatu daerah merupakan suatu hal yang tidak dapat diciptakan/dibuat, karena hal ini merupakan suatu aset yang bersifat spesifik dan tertentu artinya tidak semua daerah memilikinya. Karena sifatnya yang langka dan tertentu inilah yang membuat sektor pertambangan dan energi memiliki nilai strategis dan ekonomis yang sangat tinggi.

Ketersediaan pertambangan (seperti galian type C, berbagai jenis bahan logam dan berbagai jenis batuan) serta energi (minyak, gas dan panas bumi) akan memberikan kontribusi pada daerah dan

perekonomian masyarakat. Eksplorasi dan eksploitasi bersifat strategis dan vital dalam menentukan realisasi pertambangan dan energi di suatu daerah.

7. Potensi Industri

Sektor industri suatu kawasan dapat diklasifikasikan dalam Industri Kecil (Rumah Tangga), Industri Menengah dan Industri Besar. Umumnya sektor industri muncul dan tumbuh dipengaruhi oleh potensi-potensi yang tersedia dalam suatu daerah. Potensi-potensi yang mempengaruhi pertumbuhan sektor industri dalam suatu daerah antara lain dipengaruhi oleh: potensi Sumber Daya Manusia, ketersediaan bahan baku (SDA), permodalan, permintaan pasar (demand) dan potensi pemasaran. Jenis Industri yang berkembang pun akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Identifikasi potensi industri suatu daerah dapat dinilai dari jumlah industri yang berjalan, keragaman jenisnya, besarnya, dan pertumbuhannya. Potensi industri akan memberikan kontribusi pada perekonomian daerah (pajak) dan penyediaan lapangan pekerjaan (produktivitas) .

8. Potensi Perdagangan

Sektor perdagangan akan tumbuh karena dipengaruhi oleh keberadaan sektor-sektor lain yang telah dijabarkan sebelumnya. Perdagangan dalam suatu daerah muncul akibat adanya keperluan pemenuhan kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Sedangkan perdagangan antar daerah muncul akibat produksi dari suatu daerah melebihi konsumsinya (jual), atau konsumsi suatu daerah melebihi produksinya (beli).

Komoditas perdagangan suatu daerah bersifat khas, karena dipengaruhi potensi yang dimiliki daerah tersebut. Daerah dengan potensi perdagangan tinggi apabila daerah tersebut memiliki kapasitas komoditas tinggi, dengan jenis yang beragam.

Intensitas aktivitas perdagangan dalam suatu daerah memberikan sinyal positif mengenai perekonomian daerah tersebut, terlebih lagi perdagangan antar daerah akan memberikan kontribusi yang tinggi pada perekonomian daerah.

9. Potensi Usaha Jasa

Sektor usaha jasa merupakan sektor yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan potensi SDM suatu daerah. Munculnya sektor usaha jasa ditentukan oleh kreativitas SDM dalam menerjemahkan kebutuhan (*demand*) bidang Jasa dalam suatu daerah dan menerapkannya dalam bentuk usaha.

Usaha Jasa akan lahir dan tumbuh seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor lain yang secara alami akan lahir kebutuhan jasa profesional untuk meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor

tersebut yang secara keseluruhan akan membentuk suatu sistem perekonomian. Sektor usaha jasa dapat dijadikan indikator tingkat perekonomian suatu daerah.

Potensi Usaha Jasa yang tinggi adalah saat jumlah usaha tinggi dan jenis usaha beragam. Potensi usaha jasa yang tinggi akan memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian suatu daerah dan masyarakat.

6.3. Pentingnya Identifikasi Karakteristik Daerah (Permasalahan dan Potensi)

Identifikasi Karakteristik Daerah, baik permasalahan maupun potensi daerah penting dilakukan sebagai bagian dari identifikasi penanganan desa terpencil, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil.

Semakin detail dan akurat hasil identifikasi karakteristik permasalahan dan potensi suatu daerah, maka akan menghasilkan suatu skenario indikasi penanganan yang semakin valid dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan suatu daerah.

Sebaliknya semakin bias dan tidak akurat hasil karakteristik permasalahan dan potensi suatu daerah, maka akan menghasilkan suatu skenario indikasi penanganan yang semakin tidak valid dan tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan suatu daerah.

Identifikasi Skenario Penanganan desa terpencil, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

BAB VII SKENARIO PENANGANAN

7.1. Penanganan dengan Pendekatan Kawasan (*Regional Approach*)

Beberapa pengertian yang terkait dengan penanganan desa terpencil, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil dalam **pendekatan kawasan (*regional approach*)**, antara lain:

- **Kawasan Terpencil** yaitu kumpulan desa-desa yang diindikasikan terpencil secara berdekatan dan membentuk suatu deliniasi/batasan tertentu (tanpa terikat batasan administratif)
- **Kawasan Tertinggal** yaitu kumpulan desa-desa yang diindikasikan tertinggal secara berdekatan dan membentuk suatu deliniasi/batasan tertentu (tanpa terikat batasan administratif)

Identifikasi Kawasan Terpencil dan Kawasan Tertinggal dapat dilakukan hanya setelah dilakukan identifikasi desa-desa terpencil dan desa-desa tertinggal yang dipetakan secara geografis. Dari pemetaan tersebutlah dapat diperoleh batasan/deliniasi kumpulan desa-desa yang bersifat terpencil atau tertinggal.

Strategi penanganan keterpencilan dan ketertinggalan dalam skala kawasan perlu diindikasikan, dipetakan dan dilakukan. Penanganan dengan menggunakan pendekatan ini memiliki arti strategis dalam efektifitas dan efisiensi pembangunan.

Strategi penanganan keterpencilan dan ketertinggalan dalam skala kawasan dapat dilakukan dengan sistem stimulasi. Dengan stimulan penanganan keterpencilan dan ketertinggalan dilakukan dengan melakukan kajian guna memilih salah satu desa dalam kawasan terindikasikan untuk kemudian dijadikan pusat pembangunan atau percontohan dengan harapan terjadi suatu efek penggandaan (*multiplier effect*) pada desa-desa disekitarnya.

7.2. Penanganan dengan Pendekatan Daerah (*Territorial Approach*)

Beberapa pengertian yang terkait dengan penanganan desa terpencil, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil dalam **pendekatan daerah (*territorial approach*)**, antara lain:

- **Daerah Terpencil** yaitu kecamatan yang lebih dari (>) 50 % desa-desanya diindikasikan terpencil
- **Daerah Tertinggal** yaitu kecamatan yang lebih dari (>) 50 % desa-desanya diindikasikan tertinggal

Identifikasi Daerah Terpencil dan Daerah Tertinggal dapat dilakukan setelah dilakukan identifikasi desa-desa terpencil dan desa-desa tertinggal yang dipetakan berdasarkan unit administratifnya. Dari pemetaan tersebutlah dapat diperoleh kesimpulan daerah-daerah (kecamatan) yang bersifat terpencil atau tertinggal.

Strategi penanganan keterpencilan dan ketertinggalan dalam skala daerah perlu diindikasikan, dipetakan dan dilakukan. Penanganan dengan menggunakan pendekatan ini memiliki arti strategis dalam kebijakan pembangunan dalam suatu pemerintahan daerah.

Strategi penanganan keterpencilan dan ketertinggalan dalam skala daerah akan menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan suatu daerah. Predikat keterpencilan dan ketertinggalan yang melekat akan memberikan dampak psikologis yang secara sadar akan memberikan dorongan/motivasi percepatan pembangunan. Selain itu predikat tersebut juga akan memberikan dampak komparatif antara daerah tersebut dengan daerah lain yang lebih maju.

7.3. Indikasi Bentuk Penanganan

7.3.1. Indikasi Bentuk Penanganan Penyelesaian Permasalahan

A. Penanganan Desa Terpencil

Penanganan keterpencilan suatu wilayah pada dasarnya adalah upaya untuk menyediakan aksesibilitas dan keterkaitan suatu daerah dengan daerah lain. Untuk mengatasi permasalahan Desa Terpencil berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, diindikasikan beberapa bentuk program penanganan antara lain:

- 1. Program Penyediaan Sarana Aksesibilitas Antar Daerah**
 - a. Penyediaan Jalan Antar wilayah
 - b. Penyediaan Jembatan
 - c. Penyediaan Dermaga
- 2. Program Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru**
 - a. Pemberdayaan Pusat-Pusat Aktivitas (Ordo II)
 - b. Penyebaran Pusat-Pusat Ekonomi Baru
 - c. Penyebaran Pusat-Pusat Pelayanan Administratif
- 3. Program Penanggulangan Bencana Cepat Tanggap**
 - a. Penyediaan *Early Warning System*
 - b. Alokasi Dana Darurat penanggulangan bencana

- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana

4. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

- a. Pemberdayaan KAT sebagai potensi pariwisata daerah
- b. Konservasi Lingkungan, Sosial dan Budaya masyarakat KAT
- c. Penyediaan kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat KAT

B. Penanganan Desa Tertinggal

Pembangunan ketertinggalan suatu wilayah merupakan program pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan keterbelakangan masyarakat dalam suatu daerah. Untuk mengatasi permasalahan Desa Tertinggal berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, diindikasikan beberapa bentuk program penanganan antara lain:

1. Program Penyediaan Prasarana Dasar Wilayah

- a. Pemerataan Ketersediaan Listrik
- b. Pemerataan Ketersediaan Air
- c. Pemerataan Ketersediaan Telepon

2. Program Penyediaan Sarana Wilayah

- a. Penyediaan Sarana Ekonomi
 - Pasar
 - Pertokoan
 - Perkantoran
 - Pedagang Kaki Lima
- b. Penyediaan Sarana Industri
 - Rumah Tangga
 - Industri Menengah
 - Industri Besar
- c. Penyediaan Sarana Kesehatan
 - Rumah Sakit
 - Puskesmas
 - Puskesmas Pembantu
- d. Penyediaan Sarana Pendidikan
 - Sekolah Dasar

- Sekolah Menengah Pertama
- Sekolah Menengah Atas
- e. Penyediaan Sarana Transportasi
 - Terminal
 - Stasiun

3. Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Pengelolaan potensi ekonomi rakyat dan sumber daya alam secara optimal bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian dan industri yang menghasilkan komoditas unggulan daerah.

Pengelolaan potensi ekonomi masyarakat ditunjukkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi, menaikkan kegiatan perdagangan lokal dan antar Daerah, terbentuknya jaringan pemasaran yang baik, serta memperluas kesempatan dan lapangan kerja.

Sedangkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam ditunjukkan untuk memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan. Kebijakan pada pembangunan pertanian yang kuat dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya nutfah daerah secara optimal. Kegiatan prioritas pengelolaan potensi ekonomi rakyat dan sumber daya alam secara optimal adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat
- b. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur, dengan pendekatan padat karya
- c. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi dengan alternatif USO (*universal Service Obligation*) untuk telekomunikasi, keperintisan untuk transportasi, dan listrik masuk desa, dengan pendekatan proyek padat karya
- d. Meningkatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat;
- e. Mendorong Investasi swasta dan asing pada potensi karakteristik daerah
- f. Meningkatkan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi, dan teknologi;
- g. Penguatan dan penataan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

4. Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat

Program pembangunan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masyarakat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, baik yang dilakukan melalui peningkatan

kualitas dan pemerataan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan. Kegiatan prioritas pendidikan adalah :

- a) Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yaitu:
 - Pendirian SD kecil dan fasilitas sarana dan filial di daerah-daerah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau
 - Perbaikan bangunan sekolah;
 - Pengadaan buku pelajaran dan alat peraga.
- b) Peningkatan kualitas dan kualifikasi guru
- c) Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun baik melalui pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah
- d) Mempercepat pemberantasan buta aksara dengan menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional;

5. Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan produktivitas ketenagakerjaan dilaksanakan melalui kegiatan melalui kegiatan prioritas

- a) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan prioritas:
 - Mengadakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja;
 - Peningkatan penyusunan dan penyebarluasan informasi pasar kerja
 - Memfasilitasi pengiriman tenaga kerja antar daerah maupun antar negara
- b) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan prioritas:
 - Pengembangan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan;
 - Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
- c) Perlindungan tenaga kerja dengan prioritas berupa:
 - Peningkatan hubungan pengusaha dengan tenaga kerja;
 - Perlindungan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

C. Penanganan Pulau-Pulau Kecil

Pembangunan Pulau-Pulau Kecil memiliki arti strategis dalam bidang ekonomis, politis, pertahanan dan keamanan. Profil karakteristik pulau-pulau kecil berbeda dengan karakteristik daerah-daerah di daratan (mainland). Pulau-pulau kecil memiliki lebih besar keterisolasian dan memiliki potensi yang relatif terbatas.

Untuk mengatasi permasalahan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, diindikasikan beberapa bentuk program penanganan antara lain:

1. **Program Penyediaan Sarana Aksesibilitas untuk Pulau Kecil**
 - a. Dermaga
 - b. Bandara
2. **Program Penyediaan Prasarana Dasar di Pulau Kecil**
 - a. Pemerataan Ketersediaan Listrik
 - b. Pemerataan Ketersediaan Air
 - c. Pemerataan Ketersediaan Telepon
3. **Program Penyediaan Sarana Dasar di Pulau Kecil**
 - a. Sarana Ekonomi
 - b. Sarana Industri
 - c. Sarana Kesehatan
 - d. Sarana Pendidikan
 - e. Sarana Transportasi

7.3.2. Indikasi Bentuk Penanganan Pengembangan Potensi Kawasan

A. Penanganan Pengembangan Potensi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Karakteristik Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki profil yang khusus dengan penekanan pada kelautan dan perikanan. Dalam rangka pengembangan potensi yang dimiliki suatu kawasan, berdasarkan potensi yang telah diidentifikasi pada bab terdahulu beberapa indikasi program penanganan yang dapat dilakukan:

1. **Program Pengembangan Potensi Keanekaragaman Endemik Bernilai Tinggi**
 - a. Pemanfaatan Keanekaragaman untuk penelitian dan pendidikan
 - b. Eksplorasi keanekaragaman dengan pemetaan dan pendataan
 - c. Eksploitasi keanekaragaman secara proporsional
 - d. Perlindungan keberadaan keanekaragaman
 - e. Penyediaan Sarana untuk mengakses keanekaragaman
2. **Program Pengembangan Potensi Pariwisata**
 - a. Mendorong Investasi Swasta dan Asing
 - b. Aktif dan Kreatif dalam Perencanaan Pariwisata

- c. Penyediaan Sarana Akomodasi
- d. Memaksimalkan Promosi

3. Program Pengembangan Potensi Perikanan dan Kelautan

- a. Optimalisasi daya guna potensi sumber daya kawasan pesisir
- b. Koordinasi berbagai sumber bantuan modal
- c. Penyediaan Akses Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan
- d. Revitalisasi lembaga koperasi
- e. Pemberdayaan kelembagaan Nelayan
- f. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kawasan pesisir
- g. Peningkatan pengawasan kegiatan ekonomi pesisir
- h. Pengembangan pusat layanan informasi Perikanan

4. Program Pengembangan Potensi Industri

- a. Mendorong Investasi untuk pertumbuhan industri pesisir
- b. Koordinasi berbagai sumber bantuan modal
- c. Penyediaan prasarana dasar wilayah
- d. Membuka peluang koperasi UKM kawasan pesisir
- e. Penyediaan sarana akses pemasaran hasil industri
- f. Pengembangan pusat layanan informasi industri
- g. Pemberdayaan lembaga dan organisasi UKM

5. Program Pengembangan Potensi Perdagangan

- a. Pemerataan ketersediaan sarana perdagangan
- b. Membuka infrastruktur akses perdagangan
- c. Mendorong investasi swasta dalam perdagangan
- d. Membuka peluang akses permodalan seluas mungkin
- e. Pemberdayaan lembaga atau organisasi perdagangan

B. Penanganan Pengembangan Potensi Kawasan Non Pesisir

Kawasan Non Pesisir merupakan kawasan yang didefinisikan sebagai kawasan selain dari kawasan pesisir, dengan karakteristik dataran rendah maupun dataran tinggi. Dalam rangka pengembangan potensi yang dimiliki suatu kawasan, berdasarkan potensi yang telah diidentifikasi pada bab terdahulu beberapa indikasi program penanganan yang dapat dilakukan:

- 1. Program Pengembangan Potensi Pariwisata**
 - a. Mendorong Investasi Swasta dan Asing
 - b. Aktif dan Kreatif dalam Perencanaan Pariwisata
 - c. Penyediaan Sarana Akomodasi
 - d. Memaksimalkan Promosi

- 2. Program Pengembangan Potensi Pertanian dan Perkebunan**
 - a. Penyediaan Infrastruktur Irigasi
 - b. Pengendalian Distribusi dan Harga Pupuk
 - c. Pengendalian Distribusi dan Harga Pestisida & Insektisida
 - d. Penyediaan Akses Pemasaran dan Distribusi Hasil Pertanian
 - e. Pemberdayaan lembaga dan organisasi petani
 - f. Revitalisasi lembaga koperasi pertanian
 - g. Pengembangan pusat layanan informasi pertanian

- 3. Program Pengembangan Potensi Kehutanan**
 - a. Penyediaan Sarana Akses untuk distribusi logging
 - b. Penyediaan Sarana Industri Pengolahan
 - c. Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan
 - d. Pengendalian Pencurian Kayu (Illegal Logging)
 - e. Pemberdayaan lembaga dan organisasi kehutanan
 - f. Pengendalian dampak lingkungan

- 4. Program Pengembangan Potensi Peternakan**
 - a. Pengendalian Distribusi dan Harga Pakan Ternak
 - b. Penyediaan Akses Pemasaran dan Distribusi Hasil Peternakan
 - c. Pemberdayaan lembaga dan organisasi Peternak
 - d. Revitalisasi lembaga koperasi
 - e. Pengembangan pusat layanan informasi peternakan

- 5. Program Pengembangan Potensi Perikanan Air Tawar**
 - a. Pengendalian Distribusi dan Harga Pakan Ikan
 - b. Penyediaan Akses Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan
 - c. Pemberdayaan lembaga dan organisasi Nelayan dan Petani Tambak
 - d. Revitalisasi lembaga koperasi

- e. Pengembangan pusat layanan informasi Perikanan

6. Program Pengembangan Potensi Pertambangan dan Energi

- a. Mendorong Investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi
- b. Penyediaan sarana akses distribusi hasil pertambangan & energi
- c. Pengendalian aktivitas eksploitasi
- d. Pengendalian dampak lingkungan

7. Program Pengembangan Potensi Industri

- a. Mendorong Investasi untuk pertumbuhan industri
- b. Koordinasi berbagai sumber bantuan modal
- c. Penyediaan prasarana dasar wilayah
- d. Membuka peluang koperasi UKM
- e. Penyediaan sarana akses pemasaran hasil industri
- f. Pengembangan pusat layanan informasi industri
- g. Pemberdayaan lembaga dan organisasi UKM

8. Program Pengembangan Potensi Perdagangan

- a. Pemerataan ketersediaan sarana perdagangan
- b. Membuka infrastruktur akses perdagangan
- c. Mendorong investasi swasta dalam perdagangan
- d. Membuka peluang akses permodalan seluas mungkin
- e. Pemberdayaan lembaga atau organisasi perdagangan

9. Program Pengembangan Potensi Usaha Jasa

- a. Pemerataan ketersediaan sarana perkantoran
- b. Mendorong investasi swasta dalam usaha jasa
- c. Memotivasi tenaga profesional untuk berpartisipasi
- d. Membuka peluang akses permodalan seluas mungkin
- e. Pemberdayaan lembaga atau organisasi profesional

7.4. Identifikasi Pengelolaan Penanganan

Setelah melakukan identifikasi bentuk penanganan untuk Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya perlu dilakukan identifikasi Pengelolaan Penanganan/Pembangunan, termasuk didalamnya instansi yang akan melakukan penanganan tersebut.

Sistem Pengelolaan Penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil dalam upaya menyelesaikan permasalahan keterpencilan dan ketertinggalan serta memicu pengembangan lebih lanjut kawasan teridentifikasi berdasarkan potensi yang dimiliki, dapat dijabarkan sebagai berikut:

7.4.1. Penanganan Pembangunan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 maka pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten. Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil juga menjadi bagian dari tanggung jawab dan kewenangan tersebut, dalam rangka mengemban program pembangunan nasional pemerataan pembangunan dan mengejar ketertinggalan pembangunan di daerah.

Dalam konteks pembangunan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil, berdasarkan hasil identifikasi bentuk penanganan yang telah dilakukan pada sub-bab terdahulu maka Pemerintah Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk penanganan pembangunan. Pelaksanaan penanganan pembangunan dilaksanakan oleh **Pemerintah Kabupaten** dengan mengoptimalkan dinas, badan, dan instansi dalam Struktur Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsinya masing-masing.

Selanjutnya **Pemerintah Provinsi** memiliki fungsi dan peran sebagai koordinator dan fasilitator dalam proses pembangunan di daerah. Sebagai *koordinator* berarti bahwa Pemerintah Provinsi yang secara struktur pemerintahan membawahi beberapa kabupaten/kota memiliki fungsi dan peran mensinergikan dan mengarahkan program pembangunan dari setiap kabupaten/kota dibawahnya agar tercipta suatu integrasi program pembangunan dalam satu wilayah provinsi. Sedangkan sebagai *fasilitator* berarti bahwa Pemerintah Provinsi akan menjadi perantara antara kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat dan memfasilitasi delegasi kebijakan yang diterima pada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya, sehingga hubungan struktural pemerintahan berjalan secara efisien, efektif dan terarah.

Sedangkan **Pemerintah Pusat** memiliki fungsi sebagai Pembuat Kebijakan (*Policy Maker*) dalam proses pembangunan nasional. Dalam era otonomi daerah, dimana kewenangan dan tanggung jawab pembangunan terkonsentrasi di daerah, Pemerintah Pusat menjadi penentu arah dan kebijakan pembangunan, dimana maksud dan tujuannya diantaranya adalah menjadikan pelaksanaan pembangunan nasional satu kesatuan yang integral. Hasil kebijakan yang dibuat selanjutnya didelegasikan kepada

pemerintah di daerah untuk selanjutnya diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing.

7.4.2. Sumber Pendanaan

Pembiayaan untuk melaksanakan Pembangunan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan desa terpencil, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil membutuhkan dukungan semua sector terkait, untuk itu kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat pusat diharapkan dapat mengalokasikan anggarannya pada pembangunan ini melalui dana dekonsentrasi maupun dana pembantuan.

Karena pada dasarnya Pembangunan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil merupakan prioritas Program Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJM Nasional. Sehingga selayaknya melalui bidang kewenangannya, tiap departemen, kementerian, badan dan instansi terkait ikut berpartisipasi pada permasalahan tersebut.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembangunan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil pada hakekatnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, untuk itu pemerintah daerah wajib memprioritaskan pengalokasian dananya untuk mengatasi ketimpangan daerahnya baik melalui APBD Provinsi, yaitu berupa subsidi daerah bawahan (tugas pembantuan); maupun APBD Kabupaten, yaitu berupa pembantuan ke desa.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dapat diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini seperti diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Kewenangan pengaturan dan kewenangan alokasi DAK berada di tangan Pemerintah Daerah.

4. Dana Swasta dan Masyarakat

Untuk daerah yang memiliki potensi sumber daya alam besar, sumber dana dapat diperoleh dari dana kapitalisasi sumber daya alam dan investasi dunia usaha/swasta. Peran masyarakat dan swasta

pada beberapa daerah yang telah berkembang memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan suatu daerah .

5. Dana Penerimaan Lain yang Sah

Dana penerimaan lain yang sah merupakan dana-dana yang belum termasuk di atas dan dapat dijadikan alokasi untuk pembangunan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil, baik yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, Lembaga non pemerintah (NGO) maupun lembaga pemerintah, serta oleh masyarakat.

7.4.3. Langkah Penanganan Pembangunan

A. Perencanaan (Planning)

Perencanaan disusun secara komprehensif dan konsisten serta mengacu kepada konsep bottom-up planning, dimana keputusan yang diambil didapat dari aspirasi bawah. Semua masukan perencanaan harus dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat secara demokratis, melalui keterlibatan berbagai kelembagaan sosial politik dan sosial ekonomi, perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui forum dialog, dan hasilnya kemudian dikaji lebih lanjut melalui forum diskusi Pemerintah Daerah dan DPRD.

Proses pemberian masukan dan asistensi dapat dilakukan kepada Pemerintah Pusat yang berdiri sebagai *policy maker* dalam lingkup nasional. Idealnya hal ini dilakukan sebagai bentuk menjunjung tinggi pembangunan sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional. Sehingga pada akhirnya tercapai cita-cita pembangunan dalam koridor nasional yang integral.

B. Pelaksanaan (Execution)

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya penyelesaian permasalahan ketertinggalan dan keterpencilan didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Untuk menunjang upaya Pemerintah Kabupaten, seluruh potensi masyarakat yang tergabung dalam berbagai kelembagaan di daerah diharapkan ikut membantu. Hal ini sejalan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan sekaligus sebagai manifestasi penerapan paradigma baru pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Dalam paradigma baru yaitu penerapan konsep good governance dalam pembangunan, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan kesejajaran peran antara pemerintah, masyarakat dan pelaku

bisnis dijunjung tinggi. Dalam rangka mewujudkan kesejajaran masyarakat, dilakukan pemberdayaan dengan memberikan ruang untuk meningkatkan partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan.

C. Pengendalian/Pengawasan (*Monitoring*)

Pengendalian / pengawasan pada hakekatnya akan, perlu dan harus dilakukan oleh setiap penyandang dana dalam kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, selayaknya pengendalian dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Internal Pemerintah Kabupaten itu sendiri. Bahkan dalam era transparansi ini, masyarakat dan pihak swasta juga dapat terlibat dalam pengendalian pembangunan. Pemerintah Kabupaten dengan DPRD setempat dapat menyiapkan wadah bagi masyarakat dan pihak swasta untuk dapat memberikan masukan/informasi hasil pengawasan, agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Pemberian sanksi bagi aparat/lembaga yang melakukan kesalahan menjadi syarat mutlak berfungsinya pengawasan.

Pengendalian pembangunan diajukan pada penilaian pencapaian sasaran fungsional dari suatu program/kegiatan/proyek sehingga diharapkan dari setiap pembangunan dapat diketahui hasil dan manfaatnya.

D. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi pelaksanaan pembangunan merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kinerja pembangunan serta merekomendasikan bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan pembangunan selanjutnya.

Pada hakekatnya evaluasi berjalan beriringan dengan kegiatan monitoring (*Monev-Monitoring Evaluation*). Sehingga pada dasarnya seperti juga pada monitoring, evaluasi seharusnya dilakukan oleh setiap penyandang dana pembangunan. Terutama untuk program pembangunan yang berkelanjutan dan berjangka panjang, evaluasi memiliki arti strategis untuk mereview arah, manfaat dan pencapaian hasil yang telah dilaksanakan.

Dalam paradigma baru, evaluasi pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Kehadiran berbagai potensi kelembagaan di luar birokrasi pemerintah dapat dipesankan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dengan difasilitasi oleh instansi pemerintah.

7.5. Strategi Prioritas Penanganan

7.5.1. Rumusan Prioritas Penanganan Permasalahan

Mengingat besarnya permasalahan yang harus dihadapi untuk menangani Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil, maka perlu dilakukan strategi pelaksanaan berupa identifikasi prioritas penanganan. Strategi Prioritas Penanganan dirumuskan dengan urutan lokasi yang paling rawan, berurut sampai dengan lokasi yang paling tidak rawan.

Dalam merumuskan Strategi Prioritas Penanganan, dilakukan dengan mengacu pada Rumusan Kemungkinan Tipologi yang telah ditetapkan pada bab terdahulu. Dengan mengacu pada kemungkinan tipologi tersebut, upaya mengurutkan Prioritas Penanganan lebih terstruktur dan terprogram.

Rumusan Strategi Prioritas Penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil mulai dari lokasi yang paling rawan, adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi Keterpencilan akibat Sarana Aksesibilitas
 - a. Daerah Terpencil (Tipologi I-A1, I-A2, I-A3, I-A4)
 - b. Pulau Kecil Terpencil (Tipologi III-A1, III-A2, III-A3, III-A4)
2. Mengatasi Ketertinggalan Infrastruktur
 - a. Kawasan Tertinggal
 - Tertinggal Prasarana Dasar (Tipologi II-A1, II-A2, II-A3, II-A4)
 - Tertinggal Sarana (Tipologi II-B1, II-B2)
 - b. Pulau Kecil Tertinggal
 - Tertinggal Prasarana Dasar (Tipologi III-B1, III-B2)
 - Tertinggal Sarana (Tipologi III-C1)
3. Mengatasi Ketertinggalan Sosial Ekonomi
 - a. Kawasan Tertinggal (Tipologi II-C1)
4. Mengatasi Keterpencilan akibat Geografis
 - a. Daerah Terpencil Karena Jarak (Tipologi I-B1, I-B2)
 - b. Daerah Terpencil karena faktor Isolasi (Tipologi I-C1)

7.5.2. Rumusan Prioritas Penanganan Pengembangan Potensi Daerah

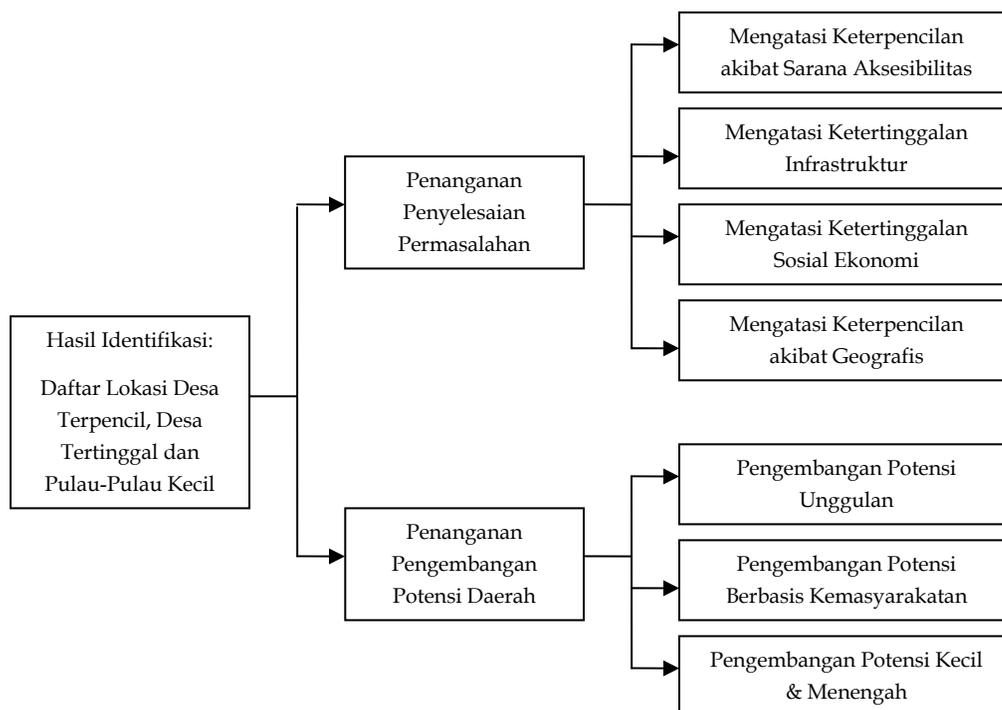
Penanganan Pengembangan Potensi Daerah merupakan suatu bentuk penanganan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi daerah yang bersifat spesifik. Penanganan Pengembangan Potensi Daerah

merupakan salah satu bentuk pembangunan yang perlu dilakukan dalam rangka Pengembangan Permukiman suatu daerah.

1. Pengembangan Potensi Unggulan
2. Pengembangan Potensi Berbasis Kemasyarakatan
3. Pengembangan Potensi Kecil & Menengah

7.5.3. Skema Strategi Prioritas Penanganan

Strategi Prioritas Penanganan yang dijelaskan di atas dapat digambarkan secara skematis pada gambar di bawah ini:



7.5.4. Keberlangsungan Program (Sustainability)

Terkait dengan Strategi Prioritas Penanganan, yang perlu ditekankan selanjutnya adalah masalah keberlanjutan program (*program sustainability*). Besarnya permasalahan yang dihadapi untuk menangani desa terpencil, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil tidak akan terselesaikan seluruhnya dalam jangka waktu yang singkat (pendek). Satu periode pemerintahan yang berlangsung selama 5 tahun tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk itu perlu adanya komitmen dan dukungan adanya keberlangsungan program penanganan desa terpencil, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil secara sistematis dan struktural.

BAB VIII PENYAJIAN HASIL IDENTIFIKASI

8.1. Penyajian Hasil Kajian

8.1. Matriks Penanganan Daerah Terpencil

Berdasarkan Daftar Lokasi dengan Pengelompokan Tipologi yang telah dilakukan pada bab terdahulu, penyajian hasil keluaran kajian berupa *Matriks Penanganan Desa Terpencil* yang diidentifikasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi setiap lokasi dapat dilihat dalam *Matriks Penanganan Desa Terpencil* terlampir.

8.2. Matriks Penanganan Kawasan Tertinggal

Berdasarkan Daftar Lokasi dengan Pengelompokan Tipologi yang telah dilakukan pada bab terdahulu, penyajian hasil keluaran kajian berupa *Matriks Penanganan Desa Tertinggal* yang diidentifikasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi setiap lokasi dapat dilihat dalam *Matriks Penanganan Desa Tertinggal* terlampir.

8.3. Matriks Penanganan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan Daftar Lokasi dengan Pengelompokan Tipologi yang telah dilakukan pada bab terdahulu, penyajian hasil keluaran kajian berupa *Matriks Penanganan Pulau-Pulau Kecil* yang diidentifikasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi setiap lokasi dapat dilihat dalam *Matriks Penanganan Pulau-Pulau Kecil* terlampir.

8.4. Matriks Pengembangan Potensi Daerah

Berdasarkan Hasil Peliputan Data dan Informasi yang dilakukan melalui peninjauan *questionnaire* yang telah dilakukan pada tahapan survey, penyajian hasil keluaran kajian berupa *Matriks Penanganan Pengembangan Potensi Daerah* yang diidentifikasi berdasarkan karakteristik potensi yang dimiliki setiap daerah dapat dilihat dalam *Matriks Penanganan Pengembangan Potensi Daerah* terlampir.

8.2. Legalisasi Hasil Identifikasi

Melihat banyak dan besarnya permasalahan yang perlu ditangani dalam pembangunan daerah terpencil, kawasan tertinggal dan pulau-pulau kecil, penting adanya keberlanjutan dan keberlanjutan (sustainability & continuity) program dengan komitmen dan dukungan politis terhadap Program Penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil.

Terkait dengan masalah ini, Legalisasi Hasil Identifikasi dalam bentuk *Peraturan Daerah* penting untuk dilakukan. Melalui Peraturan Daerah, hasil identifikasi akan menjadi program pembangunan yang secara berkelanjutan akan diemban pemerintah daerah khususnya penanganan Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil.

| CONTOH ISI/TABEL PENILAIAN (SCORING) DESA TERTINGGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|-------------|----|-------------|----|--------|---------------------------|-------|---------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERPENCIL, DESA TERTINGGAL DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | PROVINSI | NO | KABUPATEN | NO | KECAMATAN | NO | DESA | PERMASALAHAN | | | | | | PENILAIAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT | | | | |
| | | | | | | | | PENILAIAN PRASARANA DASAR | | | PENILAIAN SARANA WILAYAH | | | TINGKAT KEMISKINAN (%) | TINGKAT PENDIDIKAN (% < SMP) | TINGKAT PRODUKTIVITAS (% Pengangguran) | | |
| | | | | | | | | AIR BERSI | LISTR | IRIGASI | SARANA EKONOMI | SARANA INDUSTRI | SARANA KESEHATA N | | | | SARANA PENDIDIKAN | SARANA TRANSPORT ASI |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 1 | Desa A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 2 | Desa B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 3 | Desa C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 5 | Desa E | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 6 | Desa F | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 7 | Desa G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 8 | Desa H | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 10 | Desa J | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 11 | Desa K | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 12 | Desa L | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 14 | Desa N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 15 | Desa O | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 16 | Desa P | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 17 | Desa Q | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 18 | Desa R | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 19 | Desa S | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 20 | Desa T | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 21 | Desa U | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 22 | Desa V | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 23 | Desa X | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 23 | Desa W | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |

| CONTOH ISIAN TABEL PENGELOMPOKAN TIPOLOGI DESA TERTINGGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|-------------|----|-------------|----|--------|---------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|--|----------|-----------|
| IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERPENCIL, DESA TERTINGGAL DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | PROVINSI | NO | KABUPATEN | NO | KECAMATAN | NO | DESA | PERMASALAHAN | | | | | | | | | TIPOLOGI | | | |
| | | | | | | | | PENILAIAN PRASARANA DASAR | | | PENILAIAN SARANA WILAYAH | | | | PENILAIAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT | | | KELOMPOK | URUTAN | |
| | | | | | | | | AIR BERSI | LISTRIK | IRIGASI | SARANA EKONOMI | SARANA INDUSTRI | SARANA KESEHATAN | SARANA PENDIDIKAN | SARANA TRANSPORTASI | TINGKAT KEMISKINAN (%) | TINGKAT PENDIDIKAN (% < SMP) | TINGKAT PRODUKTIVITAS (% Pengangguran) | TIPOLOGI | PRIORITAS |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 1 | 2 | Desa B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A1 | 1 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 2 | 7 | Desa G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | A1 | 2 |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 3 | 11 | Desa K | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | A1 | 3 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 5 | 23 | Desa X | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | A2 | 4 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 1 | 3 | Desa C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | A2 | 5 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 2 | 8 | Desa H | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | A2 | 6 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 4 | 18 | Desa R | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | A3 | 7 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 1 | 1 | Desa A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | A3 | 8 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 3 | 12 | Desa L | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | A3 | 9 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 3 | 14 | Desa N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | A4 | 10 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 2 | 6 | Desa F | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | A4 | 11 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 2 | 10 | Desa J | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | A4 | 12 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 4 | 19 | Desa S | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | B1 | 13 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 3 | 15 | Desa O | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | B1 | 14 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 5 | 23 | Desa W | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | B1 | 15 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 4 | 16 | Desa P | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | B2 | 16 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 1 | 5 | Desa E | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | B2 | 17 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 5 | 22 | Desa V | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | B2 | 18 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 5 | 21 | Desa U | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | C1 | 19 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 4 | 17 | Desa Q | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | C1 | 20 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 4 | 20 | Desa T | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | C1 | 21 | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 2 | 9 | Desa I | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Tidak Masuk | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 1 | 4 | Desa D | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Tidak Masuk | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | | Kecamatan 3 | 13 | Desa M | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Tidak Masuk | | |

| CONTOH ISIAN TABEL PENGELOMPOKAN TIPOLOGI PULAU-PULAU KECIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|----|------------|-----------|----|----|----|-------|----|----|----|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERPENCIL, DESA TERTINGGAL DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | PROVINSI | KABUPATEN | NO | NAMA PULAU | KOORDINAT | | | | | | | | KRITERIA PULAU-PULAU KECIL | | | PERMASALAHAN | | | TIPOLOGI | |
| | | | | | LINTANG | | | | BUJUR | | | | LUAS PULAU (KM2) | JML PENDUDU K (JIWA) | UNIT KOMUNITA S | SARANA AKSESIBILITA S | PRASARAN A WILAYAH | SARANA WILAYAH | KELOMPO K TIPOLOGI | URUTAN PRIORITAS |
| | | | | | DD | MM | SS | H | DDD | MM | SS | H | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 3 | Pulau C | 10 | 03 | 43 | LS | 104 | 15 | 37 | BT | 526 | 4.345 | Desa | 1 | 1 | 1 | A1 | 1 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 6 | Pulau F | 01 | 01 | 30 | LS | 104 | 08 | 18 | BT | 982 | 6.732 | Dusun | 1 | 1 | 1 | A1 | 2 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 8 | Pulau H | 01 | 30 | 12 | LS | 105 | 30 | 36 | BT | 756 | 8.219 | Dusun | 1 | 1 | 1 | A1 | 3 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 12 | Pulau L | 01 | 31 | 50 | LS | 105 | 23 | 30 | BT | 1507 | 9.102 | Desa | 1 | 1 | 2 | A2 | 4 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 2 | Pulau B | 01 | 34 | 42 | LS | 105 | 41 | 30 | BT | 1102 | 7.321 | Dusun | 1 | 1 | 2 | A2 | 5 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 9 | Pulau I | 10 | 02 | 03 | LS | 104 | 10 | 47 | BT | 963 | 4.821 | Dusun | 1 | 1 | 3 | A2 | 6 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 11 | Pulau K | 01 | 33 | 16 | LS | 103 | 30 | 58 | BT | 829 | 3.213 | Dusun | 1 | 2 | 1 | A3 | 7 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 13 | Pulau M | 00 | 33 | 24 | LS | 103 | 21 | 49 | BT | 741 | 6.213 | Desa | 1 | 2 | 1 | A3 | 8 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 16 | Pulau P | 01 | 50 | 00 | LS | 104 | 33 | 00 | BT | 531 | 5.132 | Dusun | 1 | 2 | 1 | A3 | 9 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 1 | Pulau A | 01 | 46 | 00 | LS | 104 | 32 | 00 | BT | 1289 | 4.827 | Dusun | 1 | 2 | 2 | A4 | 10 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 10 | Pulau J | 02 | 15 | 00 | LS | 104 | 55 | 00 | BT | 1652 | 6.921 | Desa | 1 | 3 | 2 | A4 | 11 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 17 | Pulau Q | 06 | 50 | 00 | LS | 113 | 39 | 00 | BT | 712 | 4.829 | Desa | 1 | 3 | 3 | A4 | 12 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 5 | Pulau E | 02 | 52 | 26 | LS | 106 | 47 | 42 | BT | 562 | 2.438 | Desa | 2 | 1 | 1 | B1 | 13 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 18 | Pulau R | 02 | 57 | 48 | LS | 106 | 41 | 35 | BT | 1752 | 3.012 | Dusun | 2 | 1 | 1 | B1 | 14 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 23 | Pulau W | 02 | 59 | 00 | LS | 106 | 42 | 12 | BT | 867 | 5.839 | Dusun | 3 | 1 | 1 | B1 | 15 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 24 | Pulau X | 01 | 32 | 37 | LS | 103 | 27 | 04 | BT | 719 | 7.839 | Desa | 2 | 1 | 2 | B2 | 16 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 19 | Pulau S | 01 | 28 | 30 | LS | 103 | 30 | 18 | BT | 832 | 3.857 | Desa | 3 | 1 | 2 | B2 | 17 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 22 | Pulau V | 01 | 39 | 00 | LS | 105 | 34 | 00 | BT | 905 | 5.829 | Dusun | 3 | 1 | 3 | B2 | 18 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 15 | Pulau O | 00 | 51 | 31 | LS | 104 | 25 | 50 | BT | 1725 | 4.839 | Desa | 2 | 2 | 1 | C1 | 19 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 4 | Pulau D | 01 | 32 | 00 | LS | 103 | 27 | 15 | BT | 1792 | 7.382 | Desa | 3 | 2 | 1 | C1 | 20 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 20 | Pulau T | 01 | 33 | 46 | LS | 103 | 38 | 50 | BT | 983 | 5.839 | Dusun | 3 | 3 | 1 | C1 | 21 |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 21 | Pulau U | 02 | 57 | 36 | LS | 106 | 49 | 05 | BT | 965 | 3.968 | Desa | 2 | 2 | 2 | Tdk masuk | |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 7 | Pulau G | 02 | 53 | 31 | LS | 107 | 02 | 48 | BT | 785 | 8.958 | Desa | 2 | 2 | 3 | Tdk Masuk | |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 14 | Pulau N | 11 | 20 | 00 | LS | 111 | 34 | 00 | BT | 972 | 3.756 | Desa | 3 | 3 | 3 | Tdk Masuk | |

LAMPIRAN MATRIKS PENANGANAN

| CONTOH ISIAN MATRIKS INDIKASI PENANGANAN DESA TERPENCIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|-------------|----|-------------|----|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|
| IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERPENCIL, DESA TERTINGGAL DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | PROVINSI | NO | KABUPATEN | NO | KECAMATAN | NO | DESA | PERMASALAHAN | | | TIPOLOGI | | INDIKASI PENANGANAN UNTUK PENYELESAIAN MASALAH (DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN LOKASI BERDASARKAN QUESTIONAIRRE) | | | | |
| | | | | | | | | SARANA AKSESIBILITAS | JARAK KE PUSAT PERTUMBUHAN (KM) | ISOLASI GEOGRAFIS | KELOMPOK TIPOLOGI | URUTAN PRIORITAS | PROGRAM PENYEDIAAN | | | PROGRAM PENGEMBANGAN | |
| | | | | | | | | | | | | | SARANA AKSESIBILITAS | | | PUSAT PERTUMBUHAN BARU | |
| | | | | | | | | | | | Jalan | Jembatan | Dermaga | Karena Jarak | Karena Isolasi | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 2 | Desa B | tidak ada | 190 | Sungai & Gunung | A1 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 7 | Desa G | tidak ada | 180 | Sungai & Gunung | A1 | 2 | √ | - | - | √ | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 11 | Desa K | tidak ada | 178 | Sungai & Gunung | A1 | 3 | √ | - | - | √ | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 23 | Desa X | Tidak Ada | 160 | Tdk Ada | A2 | 4 | √ | - | √ | √ | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 3 | Desa C | Tidak Ada | 160 | Tdk Ada | A2 | 5 | √ | √ | - | √ | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 8 | Desa H | Tidak Ada | 155 | Tdk Ada | A2 | 6 | √ | - | √ | √ | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 18 | Desa R | Tidak Ada | 88 | Sungai | A3 | 7 | √ | - | √ | - | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 1 | Desa A | Tidak Ada | 87 | Sungai | A3 | 8 | √ | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 12 | Desa L | Tidak Ada | 85 | Sungai | A3 | 9 | √ | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 14 | Desa N | Tidak Ada | 98 | Tdk Ada | A4 | 10 | √ | - | √ | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 6 | Desa F | Tidak Ada | 98 | Tdk Ada | A4 | 11 | √ | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 10 | Desa J | Tidak Ada | 95 | Tdk Ada | A4 | 12 | √ | √ | √ | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 19 | Desa S | ada | 125 | Gunung | B1 | 13 | - | - | - | √ | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 15 | Desa O | ada | 125 | Gunung | B1 | 14 | - | - | - | √ | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 23 | Desa W | ada | 120 | Gunung | B1 | 15 | - | - | - | √ | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 16 | Desa P | ada | 127 | tidak ada | B2 | 16 | - | - | - | √ | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 5 | Desa E | ada | 127 | tidak ada | B2 | 17 | - | - | - | √ | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 22 | Desa V | ada | 119 | tidak ada | B2 | 18 | - | - | - | √ | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 21 | Desa U | ada | 96 | Gunung | C1 | 19 | - | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 17 | Desa Q | ada | 93 | Sungai & Gunung | C1 | 20 | - | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 20 | Desa T | ada | 93 | Gunung | C1 | 21 | - | - | - | - | √ |

CONTOH ISI AN MATRIKS INDIKASI PENANGANAN DESA TERTINGGAL
IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERPENCIL, DESA TERTINGGAL DAN PULAU-PULAU KECIL

| NO | PROVINSI | NO KABUPATEN | KECAMATAN | NO DESA | PERMASALAHAN | | | | | | | | | | TIPOLOGI | | INDIKASI PENANGANAN UNTUK PENYELESAIAN MASALAH (DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN LOKASI BERDASARKAN QUESTIONAIRE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|------------|---|--------|---|-----------|----------------|--|------------------|-------------------|---------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | PENILAIAN PRASARANA DASAR | | | PENILAIAN SARANA WILAYAH | | | | | PENILAIAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT | | | | KELOMPOK | URUTAN | PROGRAM PEMERATAAN KETERSEDIAAN PRASARANA DASAR | | | PROGRAM PEMERATAAN KETERSEDIAAN SARANA WILAYAH | | | | | PROGRAM PENINGKATAN MASALAH SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AIR BERSI | LISTR | PENGAI | SARANA EKONOMI | SARANA INDUSTRI | SARANA KESEHATA N | SARANA PENDIDIKAN | SARANA TRANSPORT ASI | TINGKAT KEMISKINA N (%) | TINGKAT PENDIDIKAN (% < SMP | TINGKAT PRODUKTIVITAS (% Pengangguran) | Air Bersih | | | Listrik | Pengairan | Sarana Ekonomi | Sarana Industri | Sarana Kesehatan | Sarana Pendidikan | Sarana Transportasi | Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat | Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat | Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | H | IK | AN | EKONOMI | INDUSTRI | KESEHATA N | PENDIDIKAN | TRANSPORT ASI | KEMISKINA N (%) | PENDIDIKAN (% < SMP | PRODUKTIVITAS (% Pengangguran) | TIPOLOGI | PRIORITAS | | | | Ekonomi | Industri | Kesehatan | Pendidikan | Transportasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 2 | Desa B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A1 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 7 | Desa G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | A1 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 11 | Desa K | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | A1 | 3 | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | - | √ | - | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 23 | Desa X | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | A2 | 4 | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | - | √ | - | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 3 | Desa C | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | A2 | 5 | √ | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | - | √ | - | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 8 | Desa H | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | A2 | 6 | √ | - | - | - | - | √ | - | - | √ | - | √ | - | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 18 | Desa R | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | A3 | 7 | √ | - | - | √ | - | - | - | - | √ | - | √ | - | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 1 | Desa A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | A3 | 8 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 12 | Desa L | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | A3 | 9 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 14 | Desa N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | A4 | 10 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 6 | Desa F | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | A4 | 11 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 10 | Desa J | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | A4 | 12 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 19 | Desa S | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | B1 | 13 | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - | √ | - | √ | - | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 15 | Desa O | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | B1 | 14 | - | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | - | | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 23 | Desa W | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | B1 | 15 | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | - | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 16 | Desa P | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | B2 | 16 | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 5 | Desa E | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | B2 | 17 | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 22 | Desa V | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | B2 | 18 | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 21 | Desa U | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | C1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 17 | Desa Q | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | C1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | | | |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 20 | Desa T | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | C1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | | | |

| CONTOH ISIAN MATRIKS INDIKASI PENANGANAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|----|------------|-----------|----|----|----|-------|----|----|----|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------------|--|---------|--------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---|
| IDENTIFIKASI LOKASI DESA TERPENCIL, DESA TERTINGGAL DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | PROVINSI | KABUPATEN | NO | NAMA PULAU | KOORDINAT | | | | | | | | KRITERIA PULAU-PULAU KECIL | | | PERMASALAHAN | | | TIPOLOGI | | INDIKASI PENANGANAN UNTUK PENYELESAIAN MASALAH (DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN LOKASI BERDASARKAN QUESTIONAIRRE) | | | | | | | | | |
| | | | | | LINTANG | | | | BUJUR | | | | PULAU (KM2) | JML PENDUDU (JIWA) | UNIT KOMUNITA (S) | SARANA AKSESIBILITA (S) | PRASARAN (A WILAYAH) | SARANA (WILAYAH) | KELOMPOK (K) | URUTAN (PRIORITAS) | PROGRAM PENYEDIAAN SARANA AKSESIBILITAS | | PROGRAM PENYEDIAAN | | PROGRAM PENYEDIAAN SARANA WILAYAH | | | | | |
| | | | | | DD | MM | SS | H | DDD | MM | SS | H | | | | | | | | | Dermaga | Bandara | Air Bersih | Listrik | Sarana Ekonomi | Sarana Industri | Sarana Kesehata | Sarana Pendidika | Sarana Transport | |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 3 | Pulau C | 10 | 03 | 43 | LS | 104 | 15 | 37 | BT | 526 | 4.345 | Desa | 1 | 1 | 1 | A1 | 1 | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | - |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 6 | Pulau F | 01 | 01 | 30 | LS | 104 | 08 | 18 | BT | 982 | 6.732 | Dusun | 1 | 1 | 1 | A1 | 2 | √ | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 8 | Pulau H | 01 | 30 | 12 | LS | 105 | 30 | 36 | BT | 756 | 8.219 | Dusun | 1 | 1 | 1 | A1 | 3 | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | - | - |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 12 | Pulau L | 01 | 31 | 50 | LS | 105 | 23 | 30 | BT | 1507 | 9.102 | Desa | 1 | 1 | 2 | A2 | 4 | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 2 | Pulau B | 01 | 34 | 42 | LS | 105 | 41 | 30 | BT | 1.102 | 7.321 | Dusun | 1 | 1 | 2 | A2 | 5 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 9 | Pulau I | 10 | 02 | 03 | LS | 104 | 10 | 47 | BT | 963 | 4.821 | Dusun | 1 | 1 | 3 | A2 | 6 | √ | - | - | √ | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 11 | Pulau K | 01 | 33 | 16 | LS | 103 | 30 | 58 | BT | 829 | 3.213 | Dusun | 1 | 2 | 1 | A3 | 7 | √ | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 13 | Pulau M | 00 | 33 | 24 | LS | 103 | 21 | 49 | BT | 741 | 6.213 | Desa | 1 | 2 | 1 | A3 | 8 | √ | - | - | - | √ | √ | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 16 | Pulau P | 01 | 50 | 00 | LS | 104 | 33 | 00 | BT | 531 | 5.132 | Dusun | 1 | 2 | 1 | A3 | 9 | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 1 | Pulau A | 01 | 46 | 00 | LS | 104 | 32 | 00 | BT | 1289 | 4.827 | Dusun | 1 | 2 | 2 | A4 | 10 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 10 | Pulau J | 02 | 15 | 00 | LS | 104 | 55 | 00 | BT | 1652 | 6.921 | Desa | 1 | 3 | 2 | A4 | 11 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 17 | Pulau Q | 06 | 50 | 00 | LS | 113 | 39 | 00 | BT | 712 | 4.829 | Desa | 1 | 3 | 3 | A4 | 12 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 5 | Pulau E | 02 | 52 | 26 | LS | 106 | 47 | 42 | BT | 562 | 2.438 | Desa | 2 | 1 | 1 | B1 | 13 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 18 | Pulau R | 02 | 57 | 48 | LS | 106 | 41 | 35 | BT | 1752 | 3.012 | Dusun | 2 | 1 | 1 | B1 | 14 | - | - | √ | - | √ | √ | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 23 | Pulau W | 02 | 59 | 00 | LS | 106 | 42 | 12 | BT | 867 | 5.839 | Dusun | 3 | 1 | 1 | B1 | 15 | - | - | √ | - | - | √ | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 24 | Pulau X | 01 | 32 | 37 | LS | 103 | 27 | 04 | BT | 719 | 7.839 | Desa | 2 | 1 | 2 | B2 | 16 | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 19 | Pulau S | 01 | 28 | 30 | LS | 103 | 30 | 18 | BT | 832 | 3.857 | Desa | 3 | 1 | 2 | B2 | 17 | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 22 | Pulau V | 01 | 39 | 00 | LS | 105 | 34 | 00 | BT | 905 | 5.829 | Dusun | 3 | 1 | 3 | B2 | 18 | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 15 | Pulau O | 00 | 51 | 31 | LS | 104 | 25 | 50 | BT | 1725 | 4.839 | Desa | 2 | 2 | 1 | C1 | 19 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 4 | Pulau D | 01 | 32 | 00 | LS | 103 | 27 | 15 | BT | 1792 | 7.382 | Desa | 3 | 2 | 1 | C1 | 20 | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi contoh | Kabupaten 2 | 20 | Pulau T | 01 | 33 | 46 | LS | 103 | 38 | 50 | BT | 983 | 5.839 | Dusun | 3 | 3 | 1 | C1 | 21 | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | √ |

| Matriks Indikasi Pengembangan Potensi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|-------------|----|-------------|----|--------|--|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|
| Identifikasi Lokasi Kawasan Tertinggal, Daerah Terpencil dan Pulaupulau Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | PROVINSI | NO | KABUPATEN | NO | KECAMATAN | NO | DESA | PENANGANAN PENGEMBANGAN POTENSI YANG DIMILIKI (DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN LOKASI BERDASARKAN QUESTIONAIRE) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Program Pengembangan Potensi Pariwisata | Program Pengembangan Potensi Pertanian dan Perkebunan | Program Pengembangan Potensi Kehutanan | Program Pengembangan Potensi Peternakan | Program Pengembangan Potensi Perikanan | Program Pengembangan Potensi Pertambangan dan Energi | Program Pengembangan Potensi Industri | Program Pengembangan Potensi Perdagangan | Program Pengembangan Potensi Usaha Jasa |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 1 | Desa A | √ | - | - | - | √ | √ | - | - | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 2 | Desa B | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 3 | Desa C | √ | √ | - | √ | √ | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 1 | Kecamatan 1 | 5 | Desa E | √ | √ | √ | √ | - | - | - | √ | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 6 | Desa F | - | √ | - | √ | - | - | √ | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 7 | Desa G | - | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 8 | Desa H | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 2 | Kecamatan 2 | 10 | Desa J | √ | √ | - | √ | - | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 11 | Desa K | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 12 | Desa L | - | √ | - | - | - | √ | - | √ | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 14 | Desa N | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 3 | Kecamatan 3 | 15 | Desa O | √ | √ | - | - | - | √ | - | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 16 | Desa P | - | √ | √ | - | √ | - | √ | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 17 | Desa Q | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 18 | Desa R | - | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 19 | Desa S | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 4 | Kecamatan 4 | 20 | Desa T | - | - | - | √ | - | - | - | - | √ |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 21 | Desa U | √ | - | √ | - | - | - | √ | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 22 | Desa V | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| 1 | Provinsi Contoh | 1 | Kabupaten 2 | 5 | Kecamatan 5 | 23 | Desa X | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |

C